

**MENGUKUR KEBERHASILAN STRATEGI PENGENTASAN
KEMISKINAN DI KAWASAN INDONESIA TIMUR**

(Tesis)

Oleh

MUHAMMAD ARIF PRASTYADI



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**MENGUKUR KEBERHASILAN STRATEGI PENGENTASAN
KEMISKINAN DI KAWASAN INDONESIA TIMUR**

Oleh

MUHAMMAD ARIF PRASTYADI

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU EKONOMI

pada

**Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

MENGUKUR KEBERHASILAN STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN DI KAWASAN INDONESIA TIMUR

**Oleh
MUHAMMAD ARIF PRASTYADI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari strategi pengentasan kemiskinan yang dirumuskan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) seperti strategi pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial yang diproksikan dengan jumlah nominal bantuan sosial dan jumlah penerima bantuan sosial, strategi pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses layanan dasar yang diproksikan dengan angka partisipasi sekolah dan angka harapan hidup, strategi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat yang diproksikan dengan tingkat partisipasi tenaga kerja formal dan jumlah usaha mikro dan kecil (UMK), strategi pengentasan kemiskinan melalui pembangunan inklusif yang diproksikan dengan tingkat ketimpangan dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat kemiskinan di kawasan Indonesia Timur. Data variabel dependen tingkat kemiskinan (P0) dan data variabel-variabel independen yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik. Sampai dengan tahun 2022, dari 13 provinsi di kawasan Indonesia Timur, terdapat 9 provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dari rata-rata nasional sehingga 9 provinsi ini menjadi fokus dalam analisis penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data panel dinamis menggunakan Generalized Method of Moment (GMM). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, terdapat pengaruh yang signifikan dari jumlah nominal bantuan sosial, jumlah penerima bantuan sosial, partisipasi tenaga kerja formal dan tingkat ketimpangan terhadap tingkat kemiskinan. Dalam jangka panjang, terdapat pengaruh yang signifikan dari jumlah usaha mikro dan kecil (UMK) terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan angka partisipasi sekolah, angka harapan hidup dan tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap tingkat kemiskinan di kawasan Indonesia Timur.

Kata Kunci: Kemiskinan, Strategi Pengentasan Kemiskinan, Indonesia Timur, Generalized Method of Moment

ABSTRACT

MEASURING THE EFFECTIVENESS OF POVERTY ALLEVIATION STRATEGIES IN EASTERN INDONESIA

By
MUHAMMAD ARIF PRASTYADI

This study aims to examine the impact of poverty alleviation strategies formulated by the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K), including: poverty alleviation through social assistance—proxied by the total amount of social assistance and the number of beneficiaries; poverty alleviation through improved access to basic services—proxied by school participation rates and life expectancy; poverty alleviation through community empowerment—proxied by the formal labor force participation rate and the number of micro and small enterprises (MSEs); and poverty alleviation through inclusive development—proxied by the inequality rate and labor force participation rate—on poverty levels in Eastern Indonesia. Data on the dependent variable (poverty rate, P0) and the independent variables were obtained from Statistics Indonesia (BPS). As of 2022, 9 out of 13 provinces in Eastern Indonesia had poverty rates above the national average. These 9 provinces became the focus of this study's analysis. The analytical method used is dynamic panel data analysis employing the Generalized Method of Moments (GMM). The results show that in the short term, the total amount of social assistance, the number of beneficiaries, the formal labor force participation rate, and the inequality rate have a significant effect on poverty levels. In the long term, the number of micro and small enterprises (MSEs) significantly affects poverty levels. Meanwhile, school participation rates, life expectancy, and labor force participation rates do not have a significant effect on poverty levels in Eastern Indonesia in either the short or long term.

Keywords: *Poverty, Poverty Alleviation Strategies, Eastern Indonesia, Generalized Method of Moment*

Judul Tesis : **MENGUKUR KEBERHASILAN STRATEGI
PENGENTASAN KEMISKINAN DI
KAWASAN INDONESIA TIMUR**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Arif Prastyadi**

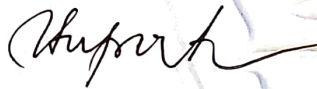
Nomor Pokok Mahasiswa : **2221021001**

Program Studi : **Magister Ilmu Ekonomi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing



Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si.
NIP. 19611209 198803 1 003



Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E.
NIP. 19740410 200812 2 001

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi



Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E.
NIP. 19740410 200812 2 001

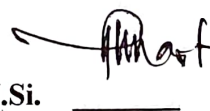
MENGESAHKAN

1. Komisi Penguji

Ketua (Pembimbing I) : **Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si.**



Anggota (Penguji I) : **Prof. Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si.**



Anggota (Penguji II) : **Dr. Ida Budiarty DA, S.E., M.Si.**



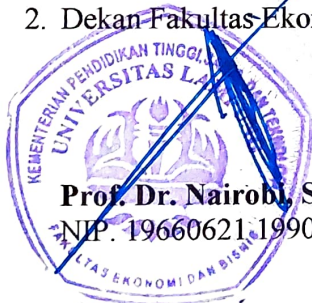
Sekretaris (Pembimbing II) : **Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP. 19660621 199003 1 003



3. Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.

NIP. 19640326 198902 1 001



4. Tanggal Lulus Ujian Tesis : 18 Juni 2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bandarlampung, 18 Juni 2025
Penulis,



Muhammad Arif Prastyadi

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Metro, 12 November 1998 sebagai anak pertama dari dua bersaudara oleh pasangan Bapak Ir. Rohadi dan Ibu Rini Mulyani.

Pendidikan yang telah ditempuh penulis yaitu Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Gunung Madu, PT. Gunung Madu Plantations, Kabupaten Lampung Tengah tahun 2004-2010. Setelah itu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Satya Dharma Sudjana, PT. Gunung Madu Plantations, Kabupaten Lampung Tengah tahun 2010-2013. Berikutnya penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung tahun 2013-2016. Dilanjutkan dengan menempuh pendidikan Strata 1 (S1) di Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya tahun 2016-2021 dan pendidikan Strata 2 (S2) di Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Lampung mulai tahun 2022 sampai dengan 2025.

Setelah lulus S1, sembari menempuh pendidikan S2 dan aktif mengikuti rekrutmen besar seperti CPNS, rekrutmen BI dan rekrutmen BUMN, kegiatan penulis adalah menjadi admin dan pembukuan di toko listrik milik orang tua di Yukum Jaya, Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu, penulis sempat mencoba membuka usaha warung makan dengan menu khas Jawa Timuran yang berlokasi di Kota Metro, bekerja sama dengan saudara sebagai peracik masakan, penulis berperan sebagai kasir dan pembukuan harian yang selalu memantau perbelanjaan bahan makanan.

MOTTO

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan”

(QS. Al-Alaq [96] : 1)

“Apa pun yang memberi kita pengetahuan baru, memberi kita kesempatan untuk
menjadi lebih rasional”

(Herbert A. Simon)

“Selalu berbuat baik kepada siapa pun, meskipun kebaikan tersebut tidak selalu
diartikan baik oleh orang lain”

(Muhammad Arif Prastyadi)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allāh subḥānahū wa ta‘ālā. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kupersembahkan karya yang sederhana ini dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati untuk:

Orang tuaku Ir. Rohadi dan Rini Mulyani, orang tua yang begitu luar biasa yang telah membesarkan dan mendidik anak-anaknya dengan penuh ketulusan dan kasih sayang serta selalu memberikan doa dan dukungan dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis, serta adikku Nurul Hafsah Putranti.

Para dosen dari Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung serta sahabat-sahabat yang senantiasa memberikan saran, motivasi dan doa dalam mengerjakan tesis ini. Tak lupa almamater tercinta Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

SANWANCANA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allāh subḥānahū wa ta‘ālā, karena atas berkat rahmat serta hidayah-Nya, penulis masih bisa merasakan segala nikmat dan anugerah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Mengukur Keberhasilan Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kawasan Indonesia Timur”**.

Adapun maksud dalam penulisan tesis ini adalah guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Ekonomi (M.E.) pada Program Studi Magister Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis telah banyak memperoleh bimbingan, bantuan serta motivasi dari semua pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Ir. Rohadi dan Ibu Rini Mulyani, orang tua yang telah memberikan banyak doa, kasih sayang dan dukungan untuk penulis, serta Adik tersayang, Nurul Hafsa Putranti.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. Nairobi S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

5. Bapak Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang begitu sabar dan luar biasa dalam memberikan arahan, kritik, ilmu dan sumbangan pemikiran dalam proses penyelesaian tesis ini.
6. Ibu Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Lampung dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang begitu sabar dan selalu mendukung dalam memberikan arahan, kritik, ilmu dan sumbangan pemikiran dalam proses penyelesaian tesis ini.
7. Bapak Prof. Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si. selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan banyak saran, nasihat dan perbaikan yang sangat bermanfaat bagi karya ilmiah ini.
8. Ibu Dr. Ida Budiarty DA, S.E., M.Si. selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan banyak saran, nasihat dan perbaikan yang sangat bermanfaat bagi karya ilmiah ini.
9. Para Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Lampung yang telah banyak mencurahkan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan S2.
10. Mas Budi dan Mba Ita selaku admin prodi di Magister Ilmu Ekonomi yang telah membantu penulis selama perkuliahan dan tesis, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
11. Badan Pusat Statistik (BPS) di 9 provinsi di Indonesia Timur yang ada dalam penelitian ini yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam memperoleh data.
12. Teman seperjuangan dan teman jalan-jalan penulis di Magister Ilmu Ekonomi Angkatan 2022, ada Mas Hadi, Bang Royiv, Amat, Julian, Irvan, Bang Andro, Bang Rulio, Endah, Mba Syifa, Qurrota, Mba Erma, Mba Fischa, Mba Titis, Mba Aang, Mba Shinta, Mba Efi, Mba Tety dan Wulan yang selalu mendukung penulis untuk berjuang. Selain itu, teman-teman di Angkatan 2023 yang juga turut mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini dari awal hingga akhir.

Semoga Allah SWT mempermudah segala urusan kita. Akhir kata penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandarlampung, 18 Juni 2025

Penulis,

Muhammad Arif Prastyadi

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat.....	12
1.4.1 Manfaat Teoritis	12
1.4.2 Manfaat Praktis.....	12
 II. TINJAUAN PUSTAKA.....	 13
2.1 Landasan Teori dan Konsep	13
2.1.1 Kemiskinan.....	13
2.1.1.1 Teori Kemiskinan	13
2.1.1.2 Konsep Kemiskinan.....	15
2.1.1.3 Indikator Kemiskinan di Indonesia.....	15
2.1.1.4 Jenis-jenis Kemiskinan	17
2.1.1.5 Penyebab Kemiskinan	18
2.1.2 Strategi Pengentasan Kemiskinan	18
2.1.2.1 Meningkatkan Program Bantuan Sosial	18
2.1.2.2 Meningkatkan Akses Terhadap Layanan Dasar	19
2.1.2.3 Pemberdayaan Masyarakat Miskin.....	19
2.1.2.4 Pembangunan Inklusif	20
2.1.3 Kaitan Antara Strategi Pengentasan Kemiskinan terhadap Tingkat Kemiskinan.....	20
2.1.3.1 Kaitan Program Bantuan Sosial dengan Kemiskinan.....	20
2.1.3.2 Kaitan Akses terhadap Layanan Dasar dengan Kemiskinan	21
2.1.3.3 Kaitan Pemberdayaan Masyarakat Miskin dengan Kemiskinan.....	22
2.1.3.4 Kaitan Pembangunan Inklusif dengan Kemiskinan.....	23
2.2 Penelitian Terdahulu.....	23
2.3 Kerangka Pikir.....	31
2.4 Hipotesis.....	34
 III. METODE PENELITIAN.....	 36

3.1 Ruang Lingkup.....	36
3.2 Jenis dan Sumber Data	37
3.3 Metode Pengumpulan Data	39
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	39
3.5 Teknik Analisis	40
3.5.1 Pengujian Model Estimasi.....	42
3.5.1.1 First-Different Generalized Method of Moment (FD-GMM).....	42
3.5.1.2 Arellano-Bond System Generalized Method of Moment (SYS-GMM).....	43
3.5.2 Menentukan Model Estimasi Terbaik	44
3.5.2.1 Uji Validitas Model (Uji Sargan)	44
3.5.2.2 Uji Konsistensi Model (Uji Arellano-Bond)	45
3.5.2.3 Uji Ketidakbiasan pada Model	45
3.5.3 Uji Signifikansi.....	45
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	48
4.1.1 Kemiskinan.....	48
4.1.2 Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Bantuan Sosial.....	49
4.1.2.1 Anggaran Bantuan Sosial Pemerintah	49
4.1.2.2 Jumlah Penerima Bantuan Sosial.....	50
4.1.3 Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Akses Layanan Dasar	50
4.1.3.1 Angka Partisipasi Sekolah	50
4.1.3.2 Angka Harapan Hidup	51
4.1.4 Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat	52
4.1.4.1 Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja Formal	52
4.1.4.2 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	53
4.1.5 Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Pembangunan Inklusif.....	54
4.1.5.1 Tingkat Ketimpangan	54
4.1.5.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	55
4.2 Hasil Penelitian	57
4.2.1 Strategi Pengentasan Kemiskinan	57
4.2.2.1 Uji Validitas FD-GMM	58
4.2.2.2 Uji Konsistensi FD-GMM	58
4.2.2.3 Uji Ketidakbiasan FD-GMM.....	58
4.2.2.4 Uji Validitas SYS-GMM	59
4.2.2.5 Uji Konsistensi SYS-GMM.....	59
4.2.2.6 Uji Ketidakbiasan SYS-GMM.....	59
4.2.2.7 Uji Signifikansi Parameter.....	60
4.2.2.8 Pengaruh Jangka Pendek dan Jangka Panjang.....	62
4.3 Pembahasan	63
4.3.1 Pengaruh Bantuan Sosial Terhadap Tingkat Kemiskinan	63

4.3.2 Pengaruh Jumlah Penerima Bantuan Sosial Terhadap Tingkat Kemiskinan.....	64
4.3.3 Pengaruh Angka Partisipasi Sekolah Terhadap Tingkat Kemiskinan	65
4.3.4 Pengaruh Angka Harapan Hidup Terhadap Tingkat Kemiskinan ..	66
4.3.5 Pengaruh Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja Formal Terhadap Kemiskinan.....	66
4.3.6 Pengaruh Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Terhadap Tingkat Kemiskinan.....	67
4.3.7 Pengaruh Tingkat Ketimpangan Terhadap Tingkat Kemiskinan ...	68
4.3.8 Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan.....	69
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	71
5.1 Simpulan	71
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Penelitian Terdahulu	23
Tabel 2. Deskripsi Data.....	37
Tabel 3. Hasil Estimasi GMM (Generalized Method of Moment)	57
Tabel 4. Uji Validitas FD-GMM.....	58
Tabel 5. Uji Konsistensi FD-GMM	58
Tabel 6. Uji Ketidakbiasan FD-GMM	58
Tabel 7. Uji Validitas SYS-GMM	59
Tabel 8. Uji Konsistensi SYS-GMM	59
Tabel 9. Uji Ketidakbiasan SYS-GMM	59
Tabel 10. Uji Simultan	60
Tabel 11. Uji Parsial.....	60
Tabel 12. Pengaruh Jangka Pendek dan Jangka Panjang	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kondisi Kemiskinan di Indonesia Secara Umum Tahun 2022	2
Gambar 2. Tingkat Kemiskinan di 9 Provinsi di Indonesia Timur Tahun 2015-2022.....	5
Gambar 3. Besaran Anggaran Bantuan Sosial Pemerintah (kiri) dan Jumlah Penerima Bantuan Sosial (kanan) di 9 Provinsi di Indonesia Timur	6
Gambar 4. Angka Harapan Hidup di 9 Provinsi di Indonesia Timur.....	7
Gambar 5. Angka Partisipasi Sekolah di 9 Provinsi di Indonesia Timur.....	8
Gambar 6. Tingkat Ketimpangan (kiri) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (kanan) di 9 Provinsi di Indonesia Timur.....	9
Gambar 7. Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja Formal (kiri) dan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (kanan) di 9 Provinsi Indonesia Timur	10
Gambar 8. Lingkaran Kemiskinan	13
Gambar 9. Kerangka Pikir.....	33
Gambar 10. Tingkat Kemiskinan 9 Provinsi di Indonesia Timur, 2015-2022 (Persen)	48
Gambar 11. Besaran Anggaran Bantuan Sosial Pemerintah di 9 Provinsi di Indonesia Timur, 2018-2022 (Rupiah)	49
Gambar 12. Jumlah Penerima Bantuan Sosial di 9 Provinsi di Indonesia Timur, 2018-2022 (Jiwa)	50
Gambar 13. Angka Partisipasi Sekolah di 9 Provinsi di Indonesia Timur, 2018-2022 (Persen)	51
Gambar 14. Angka Harapan Hidup di 9 Provinsi di Indonesia Timur, 2018-2022 (Usia)	52
Gambar 15. Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja Formal di 9 Provinsi di Indonesia Timur, 2018-2022 (Persen).....	53
Gambar 16. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil di 9 Provinsi di Indonesia Timur, 2018-2022 (Unit)	54

Gambar 17. Tingkat Ketimpangan di 9 Provinsi di Indonesia Timur, 2018-2022 (Rasio).....	55
Gambar 18. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di 9 Provinsi di Indonesia Timur, 2018-2022 (Persen).....	56

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

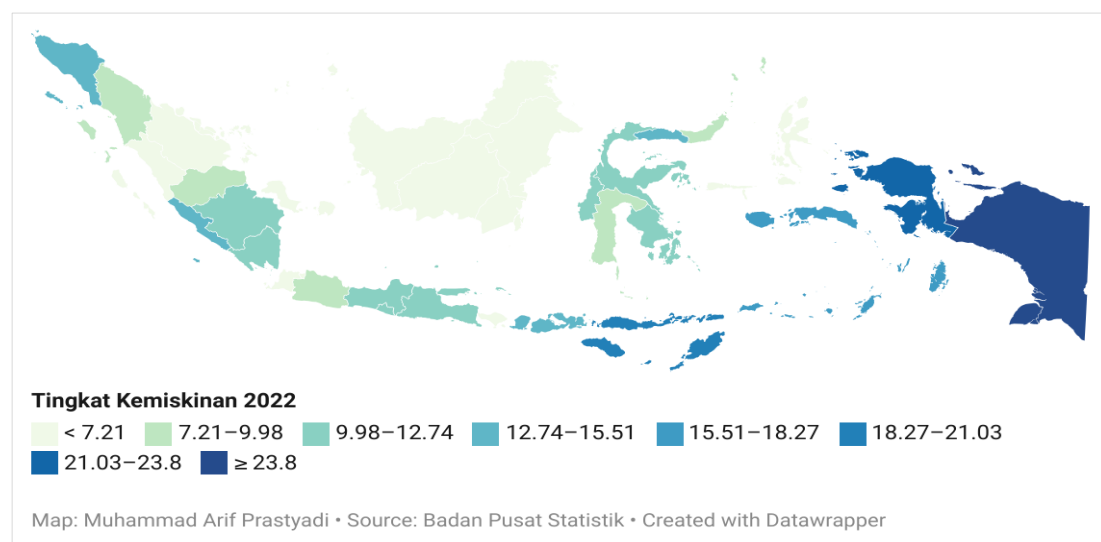
Agenda 2030 dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) memberikan kerangka kerja yang telah dijanjikan untuk dipenuhi oleh semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). SDGs meneruskan pekerjaan yang dimulai oleh *Milenium Development Goals* (MDGs) yang mendorong kampanye global dari tahun 2000-2015 untuk mengakhiri kemiskinan dalam berbagai dimensinya. SDGs berfokus pada pembangunan global dan keberlanjutan, serta menunjukkan pemahaman bahwa lingkungan hidup bukanlah sebuah tambahan atau lawan dari pembangunan berkelanjutan melainkan landasan yang mendasari semua tujuan lainnya (Woodbridge, 2015).

Mengutip halaman resmi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), terdapat 17 SGD/TPB dengan masing-masing targetnya, yakni (1) penghapusan kemiskinan, (2) penghapusan kelaparan, (3) menjamin kehidupan yang sehat dan sejahtera, (4) pendidikan yang bermutu, (5) kesetaraan gender, (6) akses air bersih dan sanitasi yang layak, (7) energi bersih yang terjangkau, (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (9) penguatan industri, inovasi dan infrastruktur, (10) pengurangan kesenjangan, (11) pembangunan kota dan permukiman berkelanjutan, (12) pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, (13) penanganan perubahan iklim, (14) pelestarian ekosistem laut, (15) perlindungan ekosistem darat, (16) perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, serta (17) kemitraan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

SDGs 1 mengharuskan negara-negara untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi dengan berbagai penyebab, di antaranya tingkat pengangguran yang tinggi, keterpinggiran sosial, serta kerentanan kelompok masyarakat tertentu terhadap bencana, penyakit dan

berbagai kondisi lain yang membatasi produktivitas mereka (United Nations, 2023a). Lebih lanjut, kemiskinan itu sendiri mengacu pada kurangnya kebutuhan fisik, aset dan pendapatan. Kemiskinan dapat dipisahkan dari dimensi kekurangan lainnya, seperti keterbatasan fisik, keterasingan, kerentanan, dan ketidakberdayaan, meskipun keempatnya saling berkaitan dan saling memengaruhi (Chambers, 1995).

Kemiskinan masih menjadi masalah yang problematis di Indonesia, meskipun kemiskinan sudah relatif berkurang sejak pasca krisis. Krisis keuangan Asia pada tahun 1998 diakui sebagai fenomena yang menyebabkan peningkatan angka kemiskinan beserta agregatnya. Namun, melalui kebijakan pengentasan kemiskinan, Indonesia bisa pulih meski tren kemiskinan masih sedikit berfluktuasi (Idrus & Rosida, 2020).



Sumber: Diolah dari Data Badan Pusat Statistik Menggunakan Datawrapper

Gambar 1. Kondisi Kemiskinan di Indonesia Secara Umum Tahun 2022

Gambar 1 merepresentasikan kondisi kemiskinan di Indonesia tahun 2022 secara keseluruhan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2022 diduduki oleh Provinsi Papua dengan 26,56 persen penduduknya dikategorikan sebagai penduduk miskin, kemudian disusul oleh Provinsi Papua Barat sebesar 21,33 persen, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 20,05 persen dan Provinsi Maluku sebesar 15,97 persen.

Kemiskinan provinsi di wilayah Timur rata-rata secara statistik lebih buruk dibandingkan dengan kemiskinan di wilayah Barat sehingga jika Indonesia ingin memberantas kemiskinan, pertama-tama Indonesia harus memfokuskan program pengentasan kemiskinannya di wilayah timur (Miranti & Resosudarmo, 2005).

Kemiskinan yang tinggi di Indonesia Timur dapat disebabkan oleh pola perekonomiannya. Beberapa penelitian menyoroti peran sektor pertanian yang masih menjadi sektor dominan di Indonesia Timur. Namun, sektor tersebut kurang mendorong pengentasan kemiskinan. Hal ini dikarenakan nilai tambah dan harga komoditas produk pertanian sangat rendah, serta harganya tertekan di pasar internasional (Arham, 2020). Selain itu juga, sebagian besar masyarakat di kawasan Indonesia Timur masih hidup dalam kekurangan akses dan konektivitas serta keterisolasian (Sandee, 2016), sehingga secara umum dengan kurangnya akses terhadap infrastruktur akan menghambat usaha rumah tangga di Indonesia (Gibson & Olivia, 2010).

Kendala infrastruktur akan menurunkan daya saing dan menjadi hambatan bagi pembangunan ekonomi serta hambatan utama dalam pengentasan kemiskinan. Dalam bukunya, Keynes (1936) berpendapat bahwa dalam perekonomian yang ditandai dengan depresi dan kegagalan pasar, diperlukan belanja publik yang tinggi untuk menyesuaikan perekonomian kembali ke tingkat lapangan kerja yang tinggi. Hal ini berarti investasi pemerintah yang tinggi di bidang infrastruktur akan meningkatkan pendapatan nasional, lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Secara konseptual, investasi infrastruktur sangat penting untuk mencapai pembangunan ekonomi serta meningkatkan dan menyediakan layanan atau akses bagi masyarakat miskin untuk memanfaatkan peluang ekonomi untuk keluar dari kemiskinan dan berkontribusi pada pertumbuhan (Meilvidiri et al., 2020).

Kawasan Indonesia Timur mempunyai potensi kekuatan ekonomi berupa ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Kemiskinan di Indonesia Timur merupakan permasalahan yang krusial mengingat angka kemiskinan dari tahun ke tahun masih tergolong tinggi meski angka kemiskinan mengalami penurunan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi di Indonesia Timur harus lebih inklusif dengan mengutamakan pembangunan ekonomi lokal yang bersumber dari sumber daya

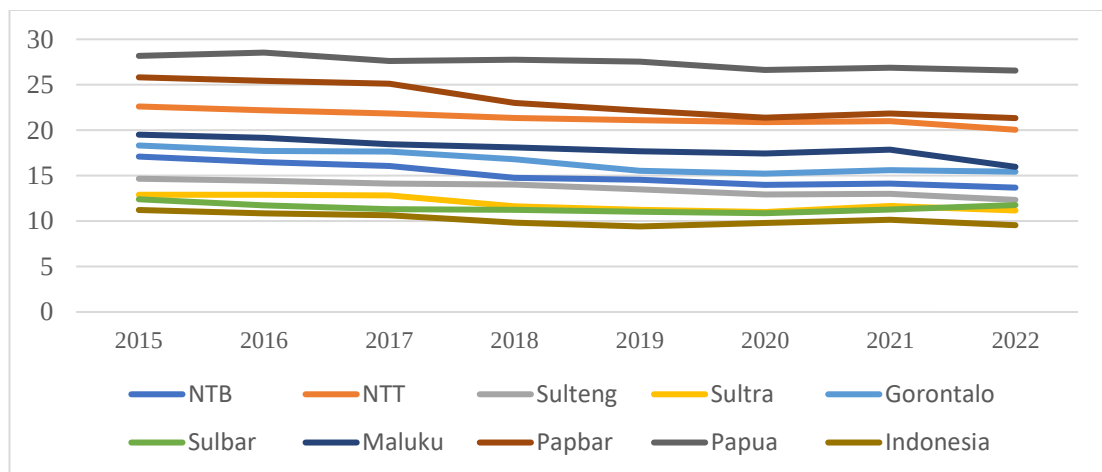
alam yang akan melibatkan masyarakat sehingga diharapkan dapat mengatasi penurunan jumlah penduduk miskin (Febriandika et al., 2022).

Program-program pengentasan kemiskinan, seperti bantuan pangan dan subsidi energi hanya dirancang untuk meningkatkan daya beli rumah tangga dan kemudian pemerintah mengembangkan program-program yang lebih maju, seperti bantuan tunai bersyarat, bantuan sekolah dan bantuan iuran asuransi kesehatan untuk mengatasi kemiskinan jangka panjang dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Nugroho et al., 2021). Dalam mengentaskan kemiskinan diperlukan adanya peningkatan pada produktivitas tenaga kerja, khususnya di pedesaan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan (Arham, 2020). Penanggulangan kemiskinan harus ditunjang dengan kemampuan individu agar dapat memperoleh taraf hidup yang lebih baik. Aksesibilitas masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pengentasan kemiskinan. Kondisi kemiskinan di wilayah timur relatif lebih tinggi karena aksesibilitas masyarakat lebih terbatas dibandingkan kawasan Indonesia Barat (Kumala, 2023).

Beberapa artikel telah meneliti keterkaitan antar SDGs khususnya SDGs 1 yakni *no poverty*. Berdasarkan artikel Kroll et al. (2019), SDGs 1 (*no poverty*) akan memiliki hubungan yang paling sinergis dengan SDGs lainnya. Hubungan yang paling kuat dan saling memperkuat dalam artikel tersebut adalah antara SDGs 1 dengan SDGs 3, SDGs 7, SDGs 8, dan SDGs 9. Oleh karena itu, menurut penelitian ini pengentasan kemiskinan dan penguatan perekonomian yang berakar pada inovasi dan infrastruktur modern terus menjadi dasar pencapaian banyak tujuan SDGs lainnya. Artikel berikutnya yakni Barbier & Burgess (2019) dan Mainali et al. (2018) di mana pengurangan kemiskinan (SDG1) dapat lebih didorong oleh manfaat positif dari perbaikan air bersih dan sanitasi (SDG6). Dalam artikel lain dari Fonseca et al. (2020) di mana studinya mengonfirmasi adanya korelasi positif yang kuat antara SDGs 7 dengan SDGs 2, SDGs 3, SDGs 4 dan SDGs 9 yang menyoroti pentingnya akses terhadap energi yang terjangkau dan bersih untuk kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mengurangi kemiskinan, diperlukan adanya integrasi dari beberapa *Sustainable Development Goals* yang menggambarkan berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemiskinan, seperti SDGs 3 atau

peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan, SDGs 4 atau peningkatan kualitas pendidikan, dan SDGs 8 atau peningkatan ketersediaan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pertama, dalam SDGs 1 mendorong pemberantasan kemiskinan ekstrem bagi semua orang di mana pun pada tahun 2030. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi ketika seseorang hidup dengan pendapatan di bawah \$2,15 per orang per hari berdasarkan paritas daya beli (PPP) tahun 2017, telah mengalami penurunan yang luar biasa selama beberapa dekade terakhir. (United Nations, 2023a).



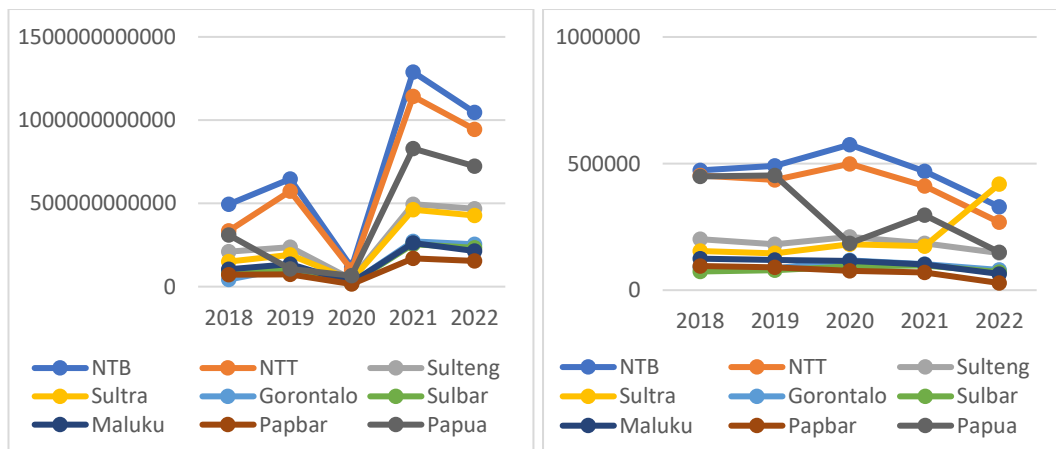
Sumber: Diolah dari Data Badan Pusat Statistik

Gambar 2. Tingkat Kemiskinan di 9 Provinsi di Indonesia Timur Tahun 2015-2022

Sampai dengan tahun 2022, terdapat 13 provinsi yang masuk ke dalam kawasan Indonesia Timur dan 9 provinsi di antaranya memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional. Provinsi-provinsi tersebut yakni Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat dan Papua. Tingginya tingkat kemiskinan di kawasan Indonesia Timur, tentu sudah seharusnya bagi antarpihak terkait merumuskan kebijakan maupun program-program yang dapat membantu mengentaskan kemiskinan.

Lebih lanjut mengenai SDGs 1, dalam poin 1.3 mendorong pelaksanaan sistem dan langkah perlindungan sosial yang sesuai dengan tingkat nasional untuk

semua orang, termasuk kelompok rentan, dan diharapkan dapat mencapai cakupan perlindungan sosial yang luas bagi masyarakat miskin dan rentan. (United Nations, 2023a). Dalam mendukung target SDGs 1 pada poin 1.3, pemerintah telah merumuskan kebijakan bantuan sosial pada salah satu dari empat strategi pengentasan kemiskinan. Data pada Gambar 3 menunjukkan besaran bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah dan jumlah penerima bantuan sosial tersebut. Sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2022, besaran anggaran dan jumlah penerima bantuan sosial masih berfluktuasi. Hal ini bergantung dari kemampuan fiskal dan kondisi kemiskinan di daerah tersebut. Namun, masih berfluktuasinya sistem bantuan sosial khususnya pada jumlah penerima, menunjukkan belum akuratnya data yang diperoleh pemerintah selaku perumus kebijakan terhadap kondisi kemiskinan sesungguhnya di lapangan. Dengan demikian, diperlukan evaluasi lebih lanjut bagi pemerintah dalam hal ini agar strategi pengentasan kemiskinan yang telah dibuat dapat sejalan dengan target SDS 1, khususnya pada poin 1.3.

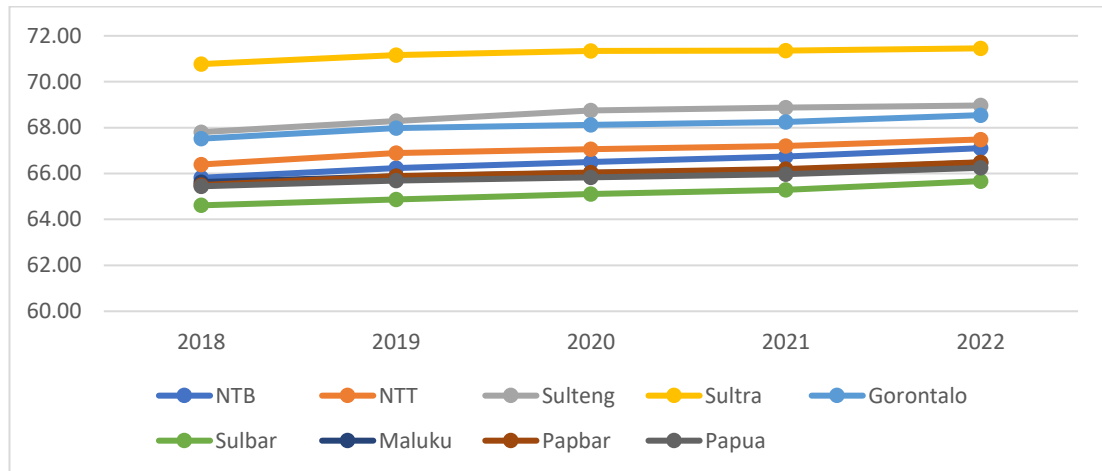


Sumber: Diolah dari Data Badan Pusat Statistik

Gambar 3. Besaran Anggaran Bantuan Sosial (kiri) dan Jumlah Penerima Bantuan Sosial (kanan) di 9 Provinsi di Indonesia Timur

Kedua, SDGs 3 menjamin kehidupan yang sehat serta tercapainya target peningkatan kesejahteraan bagi seluruh penduduk di semua usia. Sebagian besar penduduk dunia masih kekurangan akses terhadap layanan kesehatan penting. Untuk menjembatani kesenjangan ini dan memastikan penyediaan layanan

kesehatan yang adil, mengatasi kesenjangan sangatlah penting. Masyarakat yang sehat adalah fondasi perekonomian yang kuat (United Nations, 2023b).



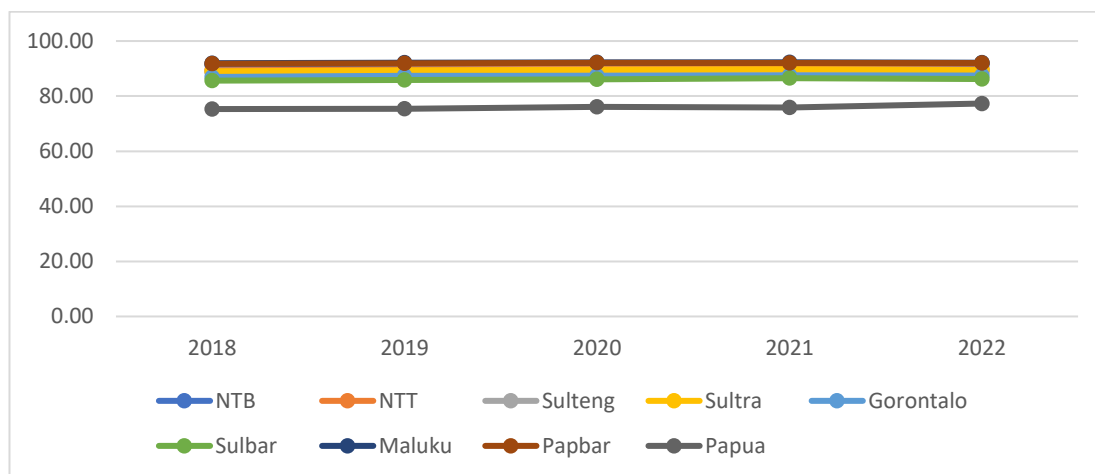
Sumber: Diolah dari Data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Kesehatan

Gambar 4. Angka Harapan Hidup di 9 Provinsi di Indonesia Timur

Dalam mencapai tujuan dalam SDGs 3, tentu dibutuhkan sebuah infrastruktur yang memadai agar kehidupan yang sehat dan sejahtera dapat terwujud. Selain itu, peningkatan infrastruktur di bidang kesehatan juga mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang pada gilirannya akan mengurangi kesenjangan bagi masyarakat dalam mendapatkan akses kesehatan. Dalam Gambar 4, sepanjang tahun 2018 sampai 2022, 9 provinsi di Indonesia Timur menunjukkan Angka Harapan Hidup selalu meningkat. Hal ini dapat menandakan bahwa kualitas kesehatan masyarakat di sana yang diproksikan dengan Angka Harapan Hidup semakin membaik setiap tahunnya. Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki Angka Harapan Hidup paling tinggi di antara 8 provinsi lainnya, sedangkan yang paling rendah adalah Provinsi Sulawesi Barat.

Ketiga, dalam SDGs 4, target yang diharapkan yakni menjamin pendidikan berkualitas yang inklusif dan setara serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Ketika masyarakat mendapatkan pendidikan yang berkualitas maka mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Untuk mencapai tujuan SDGs 4, pembiayaan pendidikan harus menjadi prioritas investasi nasional. Selain itu, langkah-langkah seperti menjadikan pendidikan gratis dan wajib,

meningkatkan jumlah guru, meningkatkan infrastruktur sekolah dasar dan melakukan transformasi digital juga merupakan hal yang penting (United Nations, 2023c).



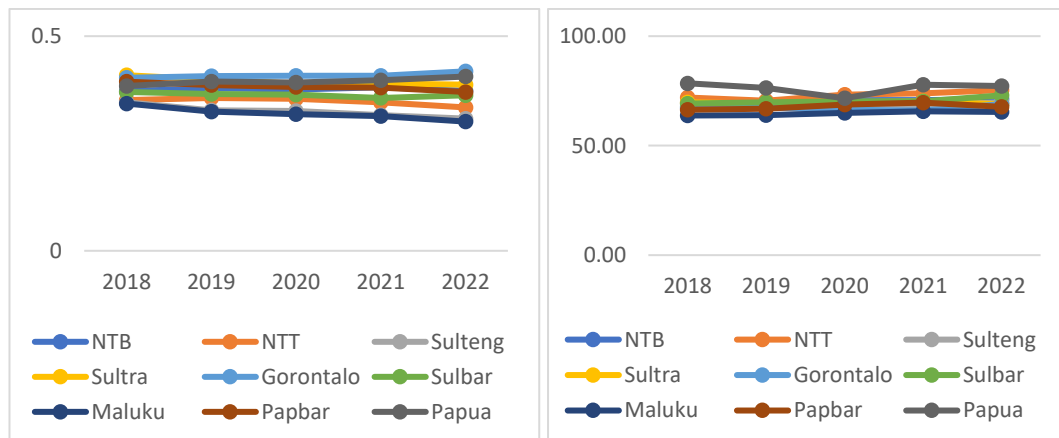
Sumber: Diolah dari Data Badan Pusat Statistik

Gambar 5. Angka Partisipasi Sekolah di 9 Provinsi di Indonesia Timur

Penjelasan pada paragraf sebelumnya memberikan pemikiran bahwa pendidikan merupakan langkah penting dalam mengentaskan kemiskinan. Pendidikan yang berkualitas harus didukung oleh sumber daya dan infrastruktur yang kuat. Berdasarkan Gambar 5, 8 provinsi di Indonesia Timur sudah menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah yang tinggi, kecuali di Provinsi Papua yang masih berada di bawah 80. Hal ini menandakan bahwa setiap tahunnya semakin banyak anak-anak usia sekolah yang memperoleh akses pendidikan. Terdapat Provinsi Papua yang masih sedikit tertinggal dibandingkan 8 provinsi lainnya. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bagi para perumus kebijakan apabila akses pendidikan dianggap penting dalam mengentaskan kemiskinan agar tidak terjadi kesenjangan akses pendidikan di wilayah Indonesia Timur.

Keempat, dalam SDGs 8, menekankan pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, penciptaan lapangan kerja, serta penyediaan pekerjaan layak bagi semua orang. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan diharapkan dapat mendorong kemajuan, membuka kesempatan kerja layak bagi seluruh masyarakat, serta meningkatkan taraf hidup.

Pekerjaan layak sendiri mencakup peluang bagi setiap individu untuk memperoleh pekerjaan produktif dengan penghasilan yang adil, jaminan keamanan di tempat kerja, perlindungan sosial bagi keluarga, serta peluang pengembangan diri dan integrasi sosial yang lebih baik (United Nations, 2023d).



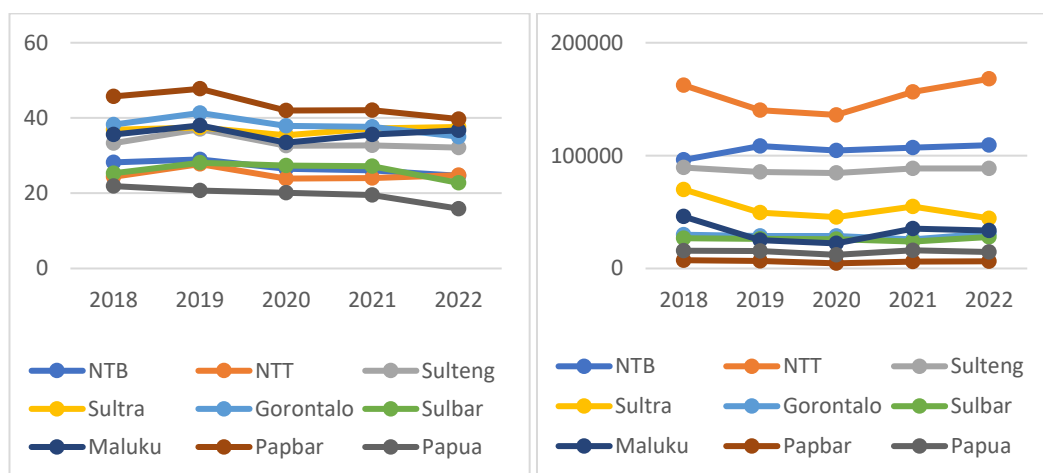
Sumber: Diolah dari Data Badan Pusat Statistik

Gambar 6. Tingkat Ketimpangan (kiri) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (kanan) di 9 Provinsi di Indonesia Timur

Data pada Gambar 6 menunjukkan bahwa selama tahun 2018 sampai dengan 2022, tingkat ketimpangan di 9 provinsi di Indonesia Timur telah menunjukkan tren yang menurun, meskipun terdapat beberapa provinsi yang tingkat ketimpangannya meningkat di tahun 2022. Kondisi ini sudah dapat dikatakan sejalan dengan target SDGs 8 yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, atau manfaat dari pertumbuhan tersebut dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Sedangkan pada tingkat partisipasi angkatan kerja di 9 provinsi di Indonesia Timur masih berfluktuasi. Hal inilah yang seharusnya dapat menjadi perhatian agar dapat mengurangi risiko masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan.

Lebih lanjut mengenai SDGs 8, dalam poin 8.3 disebutkan pentingnya mendorong kebijakan pembangunan yang mendukung aktivitas produktif, penciptaan pekerjaan yang layak, pengembangan kewirausahaan, kreativitas dan inovasi. Selain itu, poin ini juga menekankan perlunya mendorong formalisasi serta pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), termasuk dengan

memperluas akses terhadap layanan keuangan (United Nations, 2023d). Data pada Gambar 7 cukup untuk menggambarkan capaian target dalam SDGs 8.3, di mana terdapat tingkat partisipasi tenaga kerja formal dan jumlah usaha mikro dan kecil (UMK). Sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, partisipasi tenaga kerja formal di 9 provinsi di Indonesia Timur justru mengalami sedikit penurunan dari tahun ke tahun. Kondisi ini terbalik dengan target SDGs 8.3 itu sendiri yang mendorong penciptaan lapangan kerja yang layak. Sedangkan untuk jumlah usaha mikro dan kecil menunjukkan tren meningkat, dan sedikit menurun pada tahun 2020. Hal ini harus dapat menjadi perhatian bagi para perumus kebijakan agar kondisi di lapangan dapat sejalan dengan target yang ingin dicapai dalam SDGs 8, khususnya pada poin 8.3.



Sumber: Diolah dari Data Badan Pusat Statistik

Gambar 7. Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja Formal (kiri) dan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (kanan) di 9 Provinsi Indonesia Timur

Berdasarkan data yang telah disajikan pada beberapa grafik di paragraf-paragraf sebelumnya, kesenjangan ekonomi dan sosial masih dialami oleh masyarakat di Indonesia Timur. Hal tersebut ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan dan pembangunan infrastruktur yang belum merata serta masih berada di bawah rata-rata nasional. Oleh karena itu, infrastruktur yang baik masih sangat diharapkan untuk lebih banyak dibangun di Indonesia Timur, mengingat sebuah infrastruktur merupakan fondasi yang kuat dalam mendukung

ketersediaannya akses terhadap layanan dasar, membangun konektivitas antarwilayah, serta membuka peluang terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi menjadi lebih baik sehingga beberapa tujuan dalam Sustainable Development Goals dapat tercapai.

Kembali pada tujuan utama dalam Sustainable Development Goals yakni tidak ada kemiskinan, dalam penelitian ini juga akan membahas strategi-strategi pengentasan kemiskinan. Beberapa strategi pengentasan kemiskinan telah dirumuskan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), di mana strategi yang pertama dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan meningkatkan program bantuan sosial, kedua dengan meningkatkan akses terhadap layanan dasar, ketiga dengan pemberdayaan masyarakat miskin dan keempat dengan pembangunan inklusif.

Keberhasilan dalam SDGs yang bersifat lintas sektoral dapat dicapai dengan baik melalui integrasi vertikal yang efektif. Hal ini berarti seluruh tingkat pemerintahan bekerja sama untuk menyelaraskan dan mempercepat tindakan strategis, memobilisasi sumber daya yang tepat, serta melibatkan pemangku kepentingan utama (Woodbridge, 2015).

1.2 Rumusan Masalah

Berikut ini disajikan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

- 1) Bagaimana pengaruh yang ditimbulkan dari strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut ini disajikan tujuan penelitian yang akan menjawab rumusan masalah.

- 1) Melakukan penghitungan dan analisis data panel dinamis mengenai pengaruh dari beberapa strategi pengentasan kemiskinan terhadap tingkat kemiskinan untuk menentukan strategi yang paling tepat diterapkan di Indonesia Timur.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu:

- a. Memberikan manfaat bagi para pembaca tentang bagaimana pengaruh yang ditimbulkan dari beberapa strategi pengentasan kemiskinan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia Timur.
- b. Memberikan manfaat bagi para pembaca mengenai seberapa efektif strategi pengentasan kemiskinan yang telah berjalan di Indonesia, khususnya Indonesia Timur selama periode penelitian.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu:

- a. Menjadi representasi dari berbagai pihak, tidak hanya mereka yang bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan, tetapi juga orang-orang dalam masyarakat yang dapat merasakan konsekuensi dari perubahan kebijakan pemerintah.
- b. Bagi pemerintah, sekiranya penelitian ini dapat digunakan sebaik-baiknya dan pemerintah harus lebih giat mengembangkan sarana dan prasarana pendukung di daerahnya untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

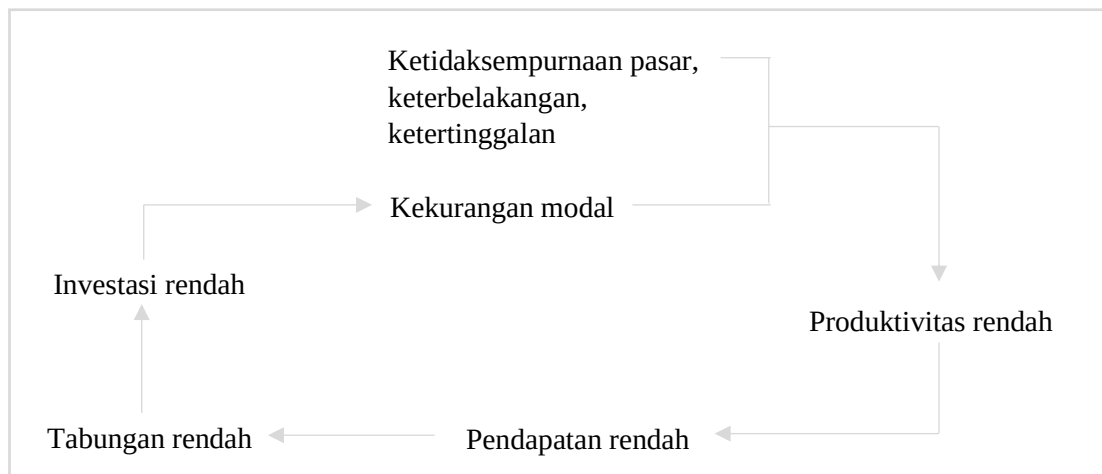
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Konsep

2.1.1 Kemiskinan

2.1.1.1 Teori Kemiskinan

Teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) digagas oleh seorang ekonom pada masa lampau yaitu Ragnar Nurkse tahun 1953.



Sumber: Kuncoro (2010: 70)

Gambar 8. Lingkaran Kemiskinan

Teori ini memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan suatu masyarakat menjadi miskin. Menurut Nurkse (Kuncoro, 2010) adanya ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan, dan kurangnya modal akan menghasilkan produktivitas yang rendah. Ketika produktivitas suatu kelompok masyarakat rendah, maka pendapatan mereka juga akan rendah. Selanjutnya, jika pendapatan masyarakat rendah, maka keinginan untuk menabung dan berinvestasi juga rendah. Akhirnya, kekurangan modal akan terjadi karena masyarakat tidak memiliki tabungan dan keengganan untuk berinvestasi.

Pandangan Chambers mengenai ketidakmampuan finansial merupakan salah satu definisi yang saat ini sedang dibahas dalam setiap inisiatif pengentasan kemiskinan di banyak negara berkembang dan dunia ketiga (Suryawati, 2015). Definisinya mengenai ketidakmampuan finansial, di mana ketidakmampuan finansial merupakan suatu pengertian yang kohesif dengan lima komponen sebagai berikut.

- 1) Kemiskinan (*proper*), didefinisikan sebagai ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- 2) Ketidakberdayaan (*powerless*), buruknya kemampuan keuangan berdampak pada kekuatan sosial seseorang atau kelompok, khususnya dalam memperoleh keadilan atau persamaan hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- 3) Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), seseorang atau sekelompok orang miskin tidak memiliki sumber daya atau kemampuan untuk menangani masalah-masalah yang tidak terantisipasi sehingga memerlukan alokasi pendapatan untuk menanganinya. Misalnya, situasi rentan seperti bencana alam, kondisi kesehatan yang memerlukan biaya pengobatan yang relatif mahal, dan skenario darurat lainnya yang memerlukan kemampuan ekonomi yang besar.
- 4) Ketergantungan (*dependence*), ketika seseorang atau kelompok orang miskin tidak dapat memperoleh penghasilan atau kekuatan sosial yang mereka butuhkan, mereka menjadi sangat tergantung pada pihak ketiga. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi, terutama yang berkaitan dengan mendapatkan uang baru. Untuk mengatasi masalah, bantuan pihak lain sangat penting, terutama jika berkaitan dengan kekurangan sumber dana.
- 5) Keterasingan (*isolation*), Chambers berpendapat bahwa dimensi keterasingan adalah aspek geografis yang menyebabkan miskin. Disebabkan fakta bahwa sebagian besar fasilitas sosial terletak di kawasan pertumbuhan ekonomi seperti kota-kota besar atau metropolitan, sementara orang-orang yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas sosial memiliki taraf hidup yang lebih rendah dan mengakibatkan kemiskinan.

2.1.1.2 Konsep Kemiskinan

Bank Dunia dalam mendefinisikan kemiskinan berfokus pada kemampuan individu untuk berfungsi dalam masyarakat. Kemiskinan digambarkan sebagai suatu kondisi di mana terdapat suatu kelompok masyarakat yang tidak mempunyai pendapatan atau konsumsi yang cukup untuk menempatkan mereka di atas ambang batas minimum yang memadai. Masyarakat miskin sering kali tidak mempunyai kemampuan utama seperti tidak memiliki pendapatan atau pendapatan yang memadai, kondisi kesehatan yang buruk, merasa tidak berdaya dan tidak memiliki kebebasan berpolitik (World Bank, 2000).

Selanjutnya, kemiskinan didefinisikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar dari sudut pandang ekonomi. Sementara itu, penduduk miskin diartikan sebagai kelompok masyarakat yang rata-rata pengeluaran per kapitanya pada suatu waktu kurang dari garis kemiskinan.

Menurut Bappenas (2004) dalam (Idris et al., 2014), kemiskinan dapat dimaknai sebagai kondisi di mana individu atau sekelompok orang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi hak-hak asasi manusia yang mendasar guna menjalani hidup yang layak dan bermartabat. Hak dasar ini mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, ada pula kebutuhan penting lainnya berupa akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta keamanan. Apabila seseorang tidak sanggup memenuhi kebutuhan serta hak-hak dasar tersebut, maka ia tergolong miskin.

Sementara itu, kemiskinan dikaitkan dengan rasa lapar, tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak mempunyai anggaran untuk berobat saat sakit. Karena sebagian besar masyarakat miskin tidak bersekolah, mereka tidak memiliki kemampuan dasar seperti membaca sehingga menyebabkan pengangguran. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakberdayaan, keterasingan, dan kurangnya kemandirian (Ravallion, 2001).

2.1.1.3 Indikator Kemiskinan di Indonesia

Indikator yang digunakan dalam mengukur kemiskinan di Indonesia salah satunya adalah indikator yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS

menggunakan dua pendekatan, yaitu (1) pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dan (2) pendekatan *headcount index*. Jumlah penduduk miskin merupakan jumlah penduduk yang kondisinya lebih rendah dari batas garis kemiskinan. Garis tersebut adalah nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan nonmakanan. Dari penjelasan tersebut, maka garis kemiskinan terbagi ke dalam dua unsur, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (*food line*) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (*non-food line*) (Kuncoro, 2010). Kemudian, pendekatan kedua dipakai oleh BPS dalam mengukur persentase kemiskinan menggunakan *headcount index* yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbecke sebagai berikut. *Headcount index* merupakan proporsi penduduk suatu negara yang hidup di bawah garis kemiskinan (Todaro & Smith, 2011).

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Di mana:

α = 0

z = garis kemiskinan

y_i = rata-rata pengeluaran per kapita penduduk yang hidup lebih rendah dari garis kemiskinan dalam sebulan ($i = 1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan

n = jumlah penduduk

Selain menghitung persentase penduduk miskin ($\alpha = 0$), BPS juga menggunakan indikator lain untuk mengukur kemiskinan, yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan ($\alpha = 1$) dan Indeks Keparahan Kemiskinan ($\alpha = 2$). Berdasarkan penjelasan BPS, Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index - P1) menggambarkan rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin besar rata-rata selisih pengeluaran penduduk dibandingkan dengan garis kemiskinan.

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Di mana:

- α = 1
 z = garis kemiskinan
 y_i = rata-rata pengeluaran per kapita penduduk yang hidup lebih rendah dari garis kemiskinan dalam sebulan ($i = 1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$
 q = jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
 n = jumlah penduduk

Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index – P2) menggambarkan ringkasan distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin besar pula ketimpangan pengeluaran di kelompok masyarakat miskin. Indeks tersebut telah menjadi standar dalam pengukuran kemiskinan berbasis pendapatan yang digunakan oleh Bank Dunia maupun berbagai lembaga lainnya, serta banyak diaplikasikan dalam penelitian empiris mengenai kemiskinan karena kepekaannya dalam menangkap kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan (Todaro & Smith, 2011).

$$P_\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$$

Di mana:

- α = 2
 z = garis kemiskinan
 y_i = rata-rata pengeluaran per kapita penduduk yang hidup lebih rendah dari garis kemiskinan dalam sebulan ($i = 1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$
 q = jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
 n = jumlah penduduk

2.1.1.4 Jenis-jenis Kemiskinan

Pertama, kemiskinan absolut ditentukan dengan membandingkan pendapatan seseorang dengan pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Lebih lanjut, tingkat upah minimum atau terkadang disebut sebagai garis kemiskinan merupakan pembeda antara keadaan miskin dan tidak miskin. Inilah yang sering disebut dengan kemiskinan absolut. Jenis kedua adalah kemiskinan relatif. Beberapa ahli berpendapat bahwa meskipun pendapatan seseorang telah memenuhi tingkat kebutuhan dasar minimal, namun upah yang

diterimanya masih lebih rendah dibandingkan dengan upah yang diperoleh masyarakat sekitar sehingga individu tersebut tetap miskin. Akibatnya, kemiskinan semacam ini ditentukan oleh kondisi lingkungan individu tersebut. Persepsi ini disebut sebagai kemiskinan relatif (Arsyad, 2015).

2.1.1.5 Penyebab Kemiskinan

Sharp et al. (2009) dalam mengidentifikasi penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan pada tingkat mikro disebabkan oleh disparitas pola kepemilikan sumber daya yang mengakibatkan distribusi pendapatan tidak merata. Kedua, kesenjangan kualitas sumber daya manusia menentukan kemiskinan, yang pada gilirannya berdampak pada produktivitas kerja dan pendapatan yang dibayarkan. Ketiga, kesenjangan akses terhadap modal merupakan akar penyebab kemiskinan.

2.1.2 Strategi Pengentasan Kemiskinan

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) merumuskan beberapa strategi dalam percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia yang dibagi menjadi empat strategi sebagai berikut.

2.1.2.1 Meningkatkan Program Bantuan Sosial

Strategi pertama adalah memperkuat serta memperluas cakupan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Sistem ini dirancang untuk melindungi individu maupun komunitas dari risiko-risiko tak terduga, seperti penyakit, kehilangan anggota keluarga, pemutusan hubungan kerja, bencana alam, dan sebagainya. Perlindungan sosial yang efektif mampu memetakan individu atau kelompok yang berpotensi terkena guncangan dan memberikan perlindungan agar mereka tidak terjerumus ke dalam kemiskinan. Oleh sebab itu, program bantuan sosial perlu dijalankan untuk mengurangi risiko tersebut, mencegah kelompok rentan jatuh miskin, serta menahan penduduk miskin agar tidak semakin terpuruk (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan).

2.1.2.2 Meningkatkan Akses Terhadap Layanan Dasar

Strategi kedua dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah memperluas akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar. Ketersediaan akses terhadap pendidikan, fasilitas kesehatan, air bersih, sanitasi, serta pangan dan gizi yang memadai dapat membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). Pendidikan merupakan salah satu layanan dasar yang harus dapat diakses oleh masyarakat miskin. Pendidikan harus menjadi prioritas karena memberikan solusi jangka panjang bagi masyarakat kurang mampu. Melestarikan kesenjangan pendidikan antara masyarakat miskin dan tidak miskin hanya akan memperburuk kemiskinan antargenerasi. Anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah yang tidak menerima pendidikan yang memadai kemungkinan besar akan tetap miskin seumur hidup mereka (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). Selain pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan juga berperan penting dalam mendorong produktivitas kerja, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan dan peluang keluar dari jerat kemiskinan. Akses yang memadai terhadap air bersih dan sanitasi menjadi faktor kunci untuk mewujudkan derajat kesehatan yang baik. Sebaliknya, konsumsi air yang tidak layak minum serta sanitasi yang buruk dapat meningkatkan risiko individu maupun masyarakat terkena berbagai penyakit (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan).

2.1.2.3 Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Strategi ketiga berupaya memberdayakan masyarakat miskin dengan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kegiatan pengentasan kemiskinan. Upaya pemberdayaan masyarakat kurang mampu harus memberikan jalan keluar dari kemiskinan sekaligus memastikan bahwa kelompok rentan tidak kembali ke kemiskinan (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). Pembangunan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan sering menggunakan mekanisme *top-down*. Kelemahannya adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Seluruh program pengentasan kemiskinan lebih banyak diatur oleh pemerintah pusat, yang di mana dalam pelaksanaannya terkadang kurang memperhatikan

karakteristik masyarakat miskin di masing-masing daerah sehingga seringkali program-program yang telah dibuat tidak berkorelasi dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat miskin setempat. Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan harus memasukkan pemberdayaan masyarakat miskin sebagai prinsip utama (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan).

2.1.2.4 Pembangunan Inklusif

Strategi keempat adalah pembangunan inklusif atau pembangunan yang melibatkan dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat. Partisipasi merupakan hal penting dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam mengentaskan kemiskinan, diperlukan perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan sejumlah besar lapangan kerja. Lebih lanjut, efek *multiplier* menyebabkan peningkatan pendapatan sebagian besar penduduk, peningkatan taraf hidup serta penurunan kemiskinan. Selain itu, memahami konteks regional juga penting dalam pembangunan inklusif. Setiap wilayah di Indonesia berpotensi menjadi pusat pertumbuhan karena keunikan sumber daya dan komoditasnya. Pembangunan ekonomi daerah sangat penting untuk memperkuat perekonomian dalam negeri (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan).

2.1.3 Kaitan Antara Strategi Pengentasan Kemiskinan terhadap Tingkat Kemiskinan

2.1.3.1 Kaitan Program Bantuan Sosial dengan Kemiskinan

Program bantuan sosial secara luas diakui sebagai strategi penting untuk pengentasan kemiskinan. Meningkatkan jumlah nominal bantuan sosial dan memperluas jumlah penerima adalah dua variabel kunci yang sering digunakan untuk mengukur efektivitas program-program ini. Studi empiris secara konsisten menunjukkan bahwa bantuan sosial, baik dalam bentuk transfer tunai langsung atau dukungan yang ditargetkan, dapat secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan. Misalnya, penelitian Meyer & Wu (2018) yang menggunakan data administratif di Amerika Serikat menemukan bahwa jaminan sosial dan transfer yang diuji berdasarkan kemampuan bersama-sama dapat memangkas tingkat kemiskinan secara substansial, dengan jaminan sosial saja mengurangi tingkat

kemiskinan hingga sepertiga dan secara tajam menurunkan kemiskinan yang parah, terutama di antara kelompok-kelompok rentan seperti orang tua dan keluarga dengan orang tua tunggal. Demikian pula, bukti dari Tiongkok menunjukkan bahwa bantuan sosial, terutama ketika diberikan melalui upaya berpasangan atau terkoordinasi oleh kekuatan sosial, dapat meningkatkan tingkat pengentasan kemiskinan hingga 14,26 poin persentase, yang menyoroti pentingnya skala bantuan dan luasnya cakupan penerima (Q. Wang et al., 2024). Namun, efektivitas program bantuan sosial dalam mengurangi kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kecukupan jumlah manfaat, keakuratan mekanisme penargetan, dan aksesibilitas program bagi mereka yang paling membutuhkan (Agustanta et al., 2024).

2.1.3.2 Kaitan Akses terhadap Layanan Dasar dengan Kemiskinan

Meningkatkan akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan merupakan strategi mendasar untuk mengurangi kemiskinan. Meningkatnya angka partisipasi sekolah, sebagai proksi akses ke pendidikan, sangat terkait dengan angka kemiskinan yang lebih rendah. Perluasan kesempatan pendidikan telah menjadi pendorong utama pertumbuhan inklusif dan pengurangan kemiskinan di seluruh dunia (Yang et al., 2022). Partisipasi sekolah yang lebih tinggi tidak hanya meningkatkan potensi penghasilan individu tetapi juga mengurangi ketimpangan pendapatan dan memutus siklus kemiskinan antargenerasi (Spada et al., 2024).

Demikian pula, harapan hidup berfungsi sebagai proksi akses ke layanan kesehatan, dan ada hubungan terbalik yang jelas antara kemiskinan dan harapan hidup. Individu yang hidup dalam kemiskinan cenderung memiliki harapan hidup yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang berpenghasilan lebih tinggi, seringkali satu dekade atau lebih (Singh & Lee, 2020). Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan-melalui perluasan layanan, infrastruktur, dan perawatan preventif-secara langsung berkontribusi pada hasil kesehatan yang lebih baik dan peningkatan harapan hidup, yang pada gilirannya meningkatkan kapasitas individu untuk keluar dari kemiskinan (Kaur, 2018). Oleh karena itu, strategi yang berfokus pada peningkatan partisipasi sekolah dan perpanjangan harapan hidup

dengan meningkatkan akses terhadap layanan dasar sangat penting untuk pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

2.1.3.3 Kaitan Pemberdayaan Masyarakat Miskin dengan Kemiskinan

Memberdayakan masyarakat miskin merupakan strategi penting dalam pengentasan kemiskinan yang berfokus pada peningkatan kapasitas individu dan masyarakat untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka secara berkelanjutan. Dua proksi penting untuk pemberdayaan adalah tingkat partisipasi tenaga kerja formal dan jumlah usaha mikro dan kecil. Tingkat partisipasi kerja formal yang lebih tinggi mencerminkan integrasi yang lebih besar dari masyarakat miskin ke dalam ekonomi formal, yang sering kali memberikan pendapatan yang lebih stabil, perlindungan sosial, dan peluang untuk pengembangan keterampilan dibandingkan dengan pekerjaan informal (Faturohim et al., 2023). Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pekerjaan formal di antara populasi berpendapatan rendah dikaitkan dengan pengurangan kemiskinan yang signifikan, karena memungkinkan individu untuk mendapatkan upah tetap dan mengakses manfaat seperti asuransi kesehatan dan rencana pensiun (Rajaona et al., 2024). Dengan demikian, mempromosikan partisipasi kerja formal tidak hanya meningkatkan pendapatan rumah tangga tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi.

Demikian pula, proliferasi usaha mikro dan kecil berfungsi sebagai mekanisme penting untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan mendorong kewirausahaan dan peluang wirausaha. Usaha-usaha ini sering bertindak sebagai titik masuk bagi kelompok-kelompok terpinggirkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, menghasilkan pendapatan, dan membangun aset (Hodijah & Mustika, 2020). Penelitian Nursini (2020) menunjukkan bahwa wilayah dengan kepadatan usaha mikro dan kecil yang lebih tinggi cenderung mengalami tingkat kemiskinan yang lebih rendah, karena usaha-usaha ini menciptakan lapangan kerja dan merangsang ekonomi lokal. Oleh karena itu, memberdayakan masyarakat miskin melalui peningkatan partisipasi tenaga kerja formal dan pengembangan usaha mikro dan kecil merupakan pendekatan multifaset yang tidak hanya menjawab kebutuhan pendapatan langsung tetapi juga membangun kemampuan ekonomi jangka panjang yang penting untuk pengentasan kemiskinan.

2.1.3.4 Kaitan Pembangunan Inklusif dengan Kemiskinan

Pembangunan inklusif adalah strategi yang bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dibagikan secara luas di seluruh masyarakat, khususnya di antara kelompok-kelompok terpinggirkan dan berpenghasilan rendah (Purwanti, 2024). Penelitian Ben Amar & Zghidi (2016) menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan yang tinggi dapat memperlambat pengentasan kemiskinan, bahkan dalam periode pertumbuhan ekonomi, karena keuntungan dari pertumbuhan tidak didistribusikan secara merata. Ketika distribusi pendapatan atau sumber daya lebih merata, kemiskinan cenderung menurun lebih cepat, karena sebagian besar penduduk memperoleh manfaat dari upaya pembangunan. Oleh karena itu, mengurangi ketimpangan merupakan komponen penting dari pembangunan inklusif yang mempercepat pengentasan kemiskinan.

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan indikator penting lain dari pembangunan inklusif. Tingkat partisipasi yang lebih tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak orang, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang kurang mampu, terlibat dalam pekerjaan produktif. Strategi pertumbuhan inklusif yang berfokus pada perluasan kesempatan kerja dan mengintegrasikan sebagian besar penduduk ke dalam angkatan kerja telah terbukti mengurangi kemiskinan secara lebih efektif dan berkelanjutan (Alexander, 2015). Dengan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan secara luas, pembangunan inklusif tidak hanya mengatasi kemiskinan secara langsung tetapi juga membantu mengurangi ketimpangan, menciptakan siklus baik yang mendukung pengurangan kemiskinan jangka panjang (Anita & Udjianto, 2024).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi dan Hasil Penelitian
Fofana et al. (2024)	Ending Poverty and Accelerating Growth in South Africa, Through	Penulis menggunakan kerangka kerja mikro-makro yang menggabungkan model <i>microsimulation</i> (untuk distribusi dan dampak langsung ke rumah tangga) dengan

	the Expansion of its Social Grant System	model makroekonomi (komposisi agregat dan efek ekonomi) untuk menganalisis implikasi ekspansi sistem bantuan sosial terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa bantuan sosial bersyarat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan bantuan tanpa syarat kepada kelompok berpenghasilan rendah justru dapat menghambat pertumbuhan. Rekomendasi yang diberikan adalah perlunya memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat menyejahterakan dan meningkatkan produktivitas, bukan sekadar konsumtif.
Kuntjorowati et al. (2024)	Effectiveness of Strengthening Social Protection and Security Programs in Alleviating Poverty in Rural Areas Through Multi-sector Partnerships	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga tidak terdapat model regresi dan hasil olah data. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, FGD, kuesioner dan evaluasi dengan model CIPP (context, input, process, product). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program PKH dan BPJS sangat efektif mengurangi kemiskinan pedesaan di Garut. Hal ini terlihat dari meningkatnya pendapatan masyarakat penerima bantuan, dapat membuka usaha kecil dan kemampuan masyarakat miskin dalam meningkatkan taraf kesehatan dan pendidikan keluarganya.
Langoday & Man (2024)	The Role of Population Growth, Education Level, Labor Force Participation Rate On Poverty Level in Indonesia	Penelitian ini menggunakan data panel dari tahun 2013-2023 dengan 35 observasi kabupaten/kota, serta teknik analisis regresi linier berganda. Dari hasil olah data menunjukkan variabel pertumbuhan populasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan, variabel tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan, dan variabel partisipasi angkatan kerja memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan bahwa pemerintah perlu mendorong kualitas pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Pshenychna & Prisniak (2024)	Inclusive Development as a Means of Reducing Economic Inequality and Poverty at The Macro Level	Artikel ini menggunakan pendekatan konseptual-teoritis dan bersifat kualitatif yang berfokus pada analisis historis dan sistematis perkembangan pemikiran tentang inklusivitas ekonomi. Artikel ini menawarkan kerangka teoritis tentang bagaimana konsep inklusivitas ekonomi berevolusi dan berfungsi dalam konteks modern. Hasilnya menegaskan bahwa pembangunan inklusif adalah pendekatan yang efektif untuk menyelesaikan masalah sosial ekonomi. Dengan menciptakan kondisi akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya, pembangunan inklusif dapat mengurangi kesenjangan, memperkuat kohesi sosial dan menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang. Penulis menambahkan bahwa pengembang kebijakan juga perlu memperhatikan peran teknologi digital dan konsep ekonomi baru dalam membentuk sistem inklusif berkelanjutan.
Saadaoui Mallek et al. (2024)	Infrastructure Development and Poverty Eradication in Sub-Saharan Africa; Its Effect and Transmission Channels	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pembangunan infrastruktur memengaruhi pengurangan kemiskinan di Afrika Sub-Sahara. Dengan menggunakan teknik analisis ECM, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa peningkatan TIK dan PDB Per Kapita dapat menurunkan kemiskinan jangka pendek. Selanjutnya, populasi dengan pendidikan tinggi secara jangka panjang dapat mengurangi kemiskinan. Implikasi kebijakan yang diberikan adalah perlu peningkatan kualitas TIK untuk mengurangi kemiskinan jangka pendek, serta peningkatan institusi pendidikan, distribusi ekonomi dan inklusivitas perdagangan perlu diperkuat agar dapat berpengaruh dalam jangka panjang terhadap kemiskinan.
Tambunan (2023)	The Importance of MSMEs for	Penelitian ini menggunakan data time series dari tahun 2007-2019 dan regresi linier

	Poverty Alleviation: A Story from Indonesia	sederhana sebagai teknik analisis. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja di sektor UMKM dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Beberapa saran yang diberikan oleh penelitian ini di antaranya, pemerintah perlu memperkuat sektor UMKM (dapat melalui pendanaan, pelatihan dan akses pasar) untuk memaksimalkan dampak pengurangan kemiskinan.
Wiratama et al. (2023)	Measuring the Physical Infrastructure Development as Poverty Reduction Program in Kalimantan, Indonesia	Penelitian ini menggunakan Physical Infrastructure Indeks (PII) yang terdiri dari 30 indikator yang dibagi dalam 7 dimensi infrastruktur (transportasi, telekomunikasi, energi, pendidikan, kesehatan, utilitas publik dan ekonomi). Datanya bersumber dari Survei Potensi Desa tahun 2018 yang mencakup 7.241 desa di seluruh Kalimantan. Penelitian ini menggunakan metode pengolahan indeks berupa Principal Component Analysis (PCA) dan regresi linier sederhana sebagai teknik analisis, serta penggunaan 2 model yakni model hanya kabupaten dan model gabungan kabupaten dan kota. Ditambah variabel kontrol berupa pertumbuhan ekonomi, rata-rata lama sekolah dan tingkat pengangguran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PII secara konsisten menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, terutama di wilayah kabupaten. Hal ini berarti semakin baik infrastruktur fisik maka dapat mendorong penurunan tingkat kemiskinan, khususnya di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, peneliti memberikan rekomendasi berupa pemerataan pembangunan antara kabupaten dan kota, terutama memprioritaskan pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan.
Wang et al. (2022)	The Impact of Rural	Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme bagaimana berbagai investasi

	Infrastructural Investment On Farmer's Income Growth in China	infrastruktur pedesaan memengaruhi pendapatan petani dan mentransformasi ekonomi pedesaan. Penelitian ini menggunakan data panel yang dianalisis dengan GMM, model mediasi linier dan pendekatan threshold panel untuk memeriksa efek nonlinieritas. Hasilnya adalah investasi di infrastruktur terkait produktivitas dan transportasi secara signifikan mempercepat transformasi ekonomi pedesaan dan menaikkan pendapatan petani.
Medeiros et al. (2021)	Infrastructure and Household Poverty in Brazil: a Regional Approach Using Multilevel Models	Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana ketersediaan, kualitas, dan akses terhadap infrastruktur memengaruhi kemiskinan rumah tangga, dengan mempertimbangkan variasi regional melalui model logistik multilevel (rumah tangga, kota, negara bagian). Data yang dihimpun dari tahun 2004-2010, dengan variabel infrastruktur berupa sanitasi, transportasi, listrik, internet dan telepon. Indeks yang digunakan dikonstruksi menggunakan Principal Component Analysis (PCA) dengan teknik analisis Hierarchical Logistic Model. Hasil yang diperoleh adalah variabel listrik, internet dan telepon berpengaruh signifikan, sedangkan transportasi dan sanitasi tidak. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan multilevel dan penggunaan indeks komposit untuk menganalisis ketimpangan spasial dalam pembangunan.
Nugroho et al. (2021)	Poverty Eradication Programs in Indonesia: Progress, Challengess and Reforms	Penelitian ini mengkaji kemajuan, tantangan dan usulan reformasi program pengentasan kemiskinan, termasuk bantuan sosial dan subsidi. Model yang digunakan adalah Recursive Dynamic CGE Model, berbasis ORANI-G. Data yang digunakan bersumber dari SUSENAS tahun 2018. Penelitian ini menemukan beberapa masalah dalam program pengentasan kemiskinan di

		Indonesia, seperti salah sasaran penerima bantuan dan kurangnya keterpaduan antarprogram. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan bahwa perlu adanya peningkatan integrasi program-program pengentasan kemiskinan.
Sudaryati et al. (2021)	The Effect of Average Length of Schooling, Life Expectancy and Economic Growth on Poverty in Banjarnegara Regency 2005-2019	Penelitian ini menggunakan data time series tahun 2005-2019 dengan teknik analisis OLS. Hasil yang diperoleh di antaranya, pendidikan dan kesehatan terbukti efektif menurunkan kemiskinan di Banjarnegara, sedangkan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian belum menunjukkan hasil signifikan. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan evaluasi ulang secara mendalam strategi pengembangan sektor pertanian agar lebih inklusif bagi masyarakat miskin.
Kroll et al. (2019)	Sustainable Development Goals (SDGs): Are we succesful in turning trade-offs into synergies?	Penelitian ini menggunakan data SDGs Indeks & Dashboard tahun 2010-2018 dari 193 negara, serta menggunakan teknik analisis korelasi Spearman ($>0,5$ = sinergi dan $<0,5$ = trade-off). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan) memiliki banyak sinergi dengan SDGs lainnya, seperti dengan SDGs 3, 7, 8 dan 9 sehingga diproyeksikan bahwa SDGs ini akan tetap menjadi pusat sinergi. Dengan demikian, fokus pada SDGs 1 dapat menjadi strategi awal menciptakan <i>virtuous cycle</i> SDGs lainnya. Dengan kata lain, SDGs 1 adalah pintu masuk paling menjanjikan untuk menciptakan efek sinergi lintas tujuan lainnya.
Tohari et al. (2019)	Targeting Poverty under Complementarities: Evidence from Indonesia's Unified Targeting System.	Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas sistem penargetan terpadu dalam meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial dan efek sinergis antarprogram. Menggunakan pendekatan kuasi-eksperimental dan data bersumber dari SUSENAS, SPS dan PODES serta periode

		penelitian tahun 2005-2014. Terdapat Propensity Score Matching dan Inverse Probability Weighting untuk mengevaluasi dampak program tunggal versus gabungan. Hasilnya menunjukkan bahwa (1) program terpadu memberikan dampak lebih besar dibanding evaluasi program tunggal dan (2) pendekatan komplementaritas antarkebijakan terbukti lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Rekomendasi yang diberikan ialah evaluasi rutin atas efektivitas kombinasi bantuan yang diberikan.
Mardiana et al. (2017)	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan dan Kesehatan serta Infrastruktur Terhadap Tingkat Pengangguran serta Tingkat Kemiskinan	Penelitian ini melihat pengaruh langsung dan tidak langsung dari pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan menggunakan metode Path Analysis. Hasil pengaruh langsung dalam penelitian ini adalah pada model 1, pendidikan dan infrastruktur tidak signifikan terhadap pengangguran, sedangkan kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran. Pada model 2, pendidikan dan infrastruktur tidak signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Selanjutnya hasil pengaruh tidak langsung menunjukkan pendidikan terhadap kemiskinan melalui pengangguran tidak signifikan, kesehatan terhadap kemiskinan melalui pengangguran negatif dan signifikan, serta infrastruktur terhadap kemiskinan melalui pengangguran tidak signifikan. Dengan demikian, rekomendasi yang diberikan adalah pengeluaran pemerintah daerah sebaiknya difokuskan pada sektor kesehatan karena terbukti menurunkan kemiskinan baik secara langsung maupun melalui jalur pengangguran (tidak langsung). Selain itu

		perlu evaluasi efektivitas belanja pemerintah di bidang pendidikan dan infrastruktur.
Liu et al. (2015)	Poverty Reduction within the Framework of SDGs and Post-2015 Development Agenda.	Artikel ini menganalisis bagaimana pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan (SDGs) saling terkait dan berinteraksi. Hal ini didukung pola pikir utama dalam penelitian ini, yakni pengentasan kemiskinan adalah syarat mendasar untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dirangkum dari penelitian ini, di antaranya, (1) mengingat kemiskinan bersifat multidimensi, diperlukan evaluasi yang menggabungkan data pendapatan, kesehatan, pendidikan dan perumahan, (2) kualitas pertumbuhan lebih utama dari kuantitas, diperlukan inklusi, perlindungan sosial dan keberlanjutan.
Annur (2013)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jekulo dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013	Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi perbedaan kondisi sosial-ekonomi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tingkat kemiskinan antara 2 kecamatan di Kabupaten Kudus. Beberapa hal yang menyebabkan kemiskinan adalah, 1) Kurangnya lapangan kerja formal dan bukan pertanian, 2) biaya pendidikan yang tergolong tinggi, 3) kurangnya program sosial, 4) kerusakan infrastruktur, dan 5) minimnya penduduk yang mempunyai keahlian. Dengan demikian, rekomendasi kebijakan yang terbentuk adalah perluasan lapangan kerja formal & non-pertanian, subsidi pendidikan, perbaikan infrastruktur, pendirian Balai Latihan Kerja, dan sosialisasi program-program sosial.
Gounder & Xing (2012)	Impact of Education and Health on Poverty Reduction: Monetary and Non-monetary	Penelitian ini bertujuan menilai dampak pendidikan dan kesehatan terhadap pengurangan kemiskinan melalui dua model, model moneter yakni pengaruh pendidikan terhadap pendapatan rumah tangga dan model non-moneter yakni dampak

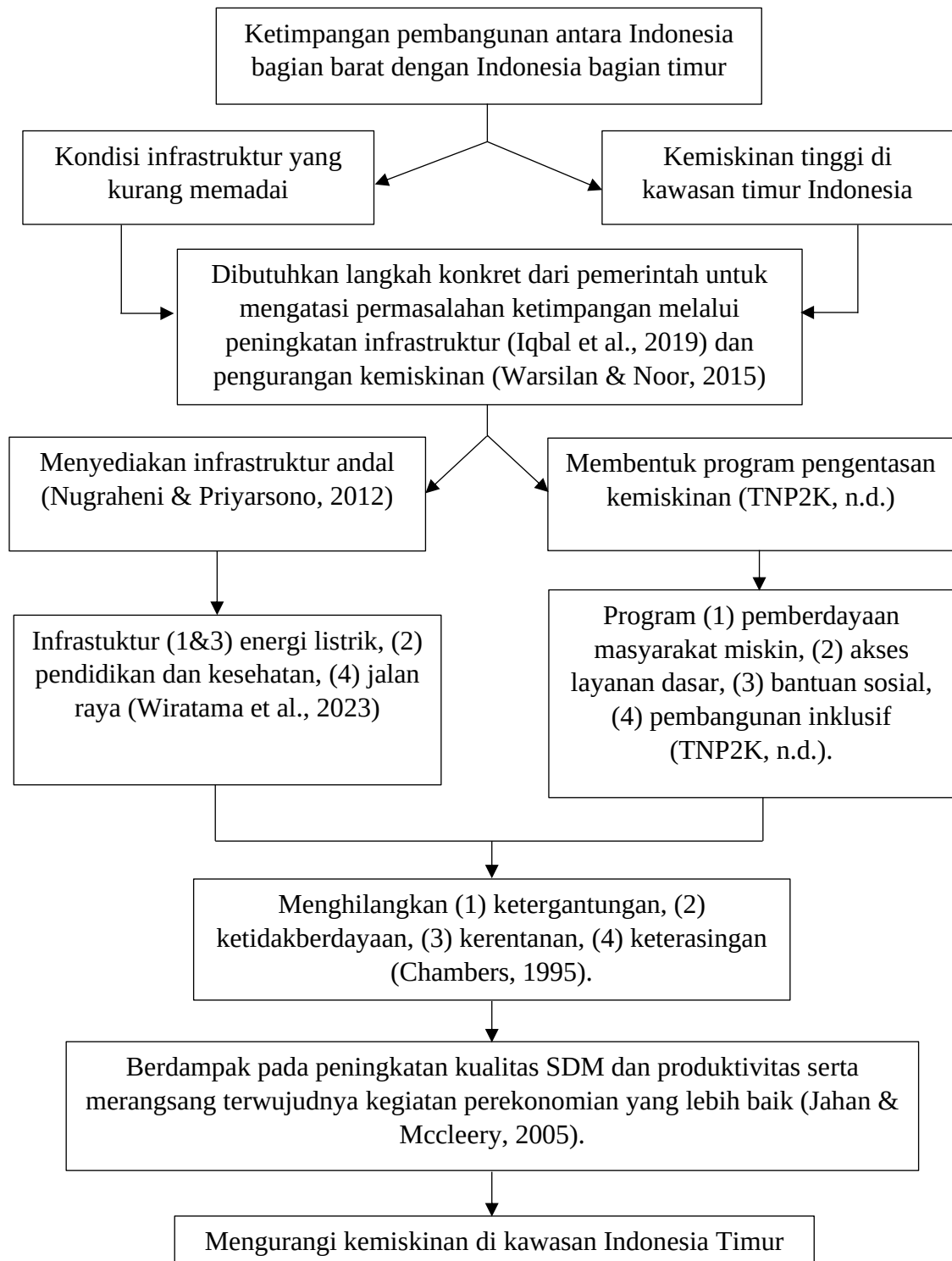
Evidence from Fiji	pendidikan terhadap keputusan perilaku kesehatan dan akses perumahan. Teknik analisis yang digunakan adalah <i>Two-Stage Least Square</i> untuk model pendapatan, <i>Quantile Regression</i> untuk melihat pengaruh di seluruh tingkat pendapatan, dan <i>Logit Regression</i> untuk menganalisis keputusan terkait kesehatan dan sanitasi. Hasil yang diperoleh adalah pendidikan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan, selain itu berdampak pada meningkatnya kesadaran kesehatan. Rekomendasi yang diberikan adalah pentingnya investasi di bidang pendidikan untuk mendorong keberlanjutan pengentasan kemiskinan.
--------------------	--

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini dibangun berdasarkan teori dan konsep kemiskinan, penelitian terdahulu, serta konsep-konsep dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) 1 tentang *no poverty* yang memiliki keterkaitan dengan beberapa tujuan SDG lainnya. Jahan & McCleery (2005) menekankan bahwa pembangunan infrastruktur dapat mengarah pada pengurangan kemiskinan melalui jalur langsung dan tidak langsung. Melalui jalur langsung, hal ini dapat mengurangi kemiskinan seiring dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, tersedianya energi yang lebih bersih dan pemerintah memberikan perlindungan terhadap bencana nasional. Dampak tidak langsung penyediaan infrastruktur terhadap kemiskinan terjadi ketika produktivitas pekerja meningkat, biaya transportasi berkurang dan terciptanya lebih banyak lapangan kerja sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti penyediaan infrastruktur dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial terhadap kehidupan masyarakat (Beall et al., 2010).

Dalam Chambers (1995), disebutkan bahwa terdapat beberapa komponen yang dapat menyebabkan miskin. Komponen-komponen tersebut seperti

ketidakberdayaan, ketergantungan, kerentanan dan keterasingan. Ketidakberdayaan masyarakat miskin akibat kurangnya akses infrastruktur pendidikan dan kesehatan, khususnya di kawasan Indonesia Timur membuat mereka tidak memiliki kemampuan mengangkat derajat mereka sendiri ke taraf yang lebih baik. Ketergantungan dan kerentanan karena kekurangan ketersediaan energi, misalnya energi listrik maka akan membuat masyarakat miskin menjadi ketergantungan pada kondisi alam yang terkadang tidak menentu. Terakhir keterasingan, kurangnya akses dan infrastruktur jalan raya akan membuat masyarakat miskin menjadi terhambat dalam hal konektivitas sehingga akan menghambat program pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut.



Gambar 9. Kerangka Pikir

2.4 Hipotesis

Hipotesis atau pun dugaan sementara dalam penelitian ini yang telah mengacu pada rumusan masalah dan teori pada subbab sebelumnya. Berikut ini adalah hipotesis dalam penelitian ini.

- 1) Diduga anggaran bantuan sosial pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di kawasan Indonesia Timur. Diharapkan dengan semakin meningkatnya bantuan yang diberikan maka akan membantu mengurangi tingkat kemiskinan.
- 2) Diduga jumlah penerima bantuan sosial berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di kawasan Indonesia Timur. Diharapkan dengan semakin meningkatnya jangkauan penerima bantuan sosial maka akan membantu mengurangi tingkat kemiskinan.
- 3) Diduga angka partisipasi sekolah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di kawasan Indonesia Timur. Diharapkan dengan semakin meningkatnya akses layanan dasar di bidang pendidikan yang diproksikan dengan angka partisipasi sekolah akan mengurangi tingkat kemiskinan.
- 4) Diduga angka harapan hidup berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di kawasan Indonesia Timur. Diharapkan dengan semakin meningkatnya akses layanan dasar di bidang kesehatan yang diproksikan dengan angka harapan hidup maka akan mengurangi tingkat kemiskinan.
- 5) Diduga tingkat partisipasi tenaga kerja formal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di kawasan Indonesia Timur. Diharapkan dengan meningkatnya program pemberdayaan masyarakat yang diproksikan dengan peningkatan partisipasi masyarakat pada pekerjaan formal maka akan mengurangi tingkat kemiskinan.
- 6) Diduga jumlah usaha mikro dan kecil berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di kawasan Indonesia Timur. Diharapkan dengan meningkatnya program pemberdayaan masyarakat yang diproksikan dengan peningkatan jumlah usaha mikro dan kecil maka akan merangsang penurunan tingkat kemiskinan.
- 7) Diduga ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di kawasan Indonesia Timur. Diharapkan dengan semakin

meningkatnya pembangunan inklusif atau pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya secara merata yang diproksikan dengan menurunnya tingkat ketimpangan maka akan merangsang penurunan tingkat kemiskinan.

- 8) Diduga tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di kawasan Indonesia Timur. Diharapkan dengan semakin meningkatnya pembangunan inklusif atau pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya secara merata yang diproksikan dengan peningkatan partisipasi angkatan kerja maka akan merangsang penurunan tingkat kemiskinan.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh strategi-strategi pengentasan kemiskinan terhadap kemiskinan di Indonesia Timur. Penelitian ini melibatkan 9 provinsi di Indonesia Timur yang memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional dengan periode waktu selama tahun 2015-2022. Strategi-strategi tersebut berasal dari rumusan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada masa Kabinet Kerja (2014-2019) dan Kabinet Indonesia Maju (2019-2024) atau pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Periode ini bersamaan dengan dimulainya Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2015, di mana tujuannya utamanya yakni mengentaskan kemiskinan menjadi akar dari penelitian ini.

Sampai dengan tahun 2022, Kawasan Timur Indonesia (KTI) memiliki 13 provinsi yang meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. Ketigabelas provinsi atau pun wilayah tersebut dikelompokkan menjadi Kawasan Indonesia Timur karena berdasarkan sejarah pada masa lalu, di mana ketigabelas provinsi tersebut pernah tergabung dalam satu provinsi yakni Provinsi Timur Raya. Kemudian, pada tahun 2023 beberapa provinsi seperti Provinsi Papua Barat dan Papua dimekarkan menjadi 4 provinsi secara keseluruhan. Pertama, terdapat Provinsi Papua Barat Daya yang dimekarkan dari Provinsi Papua Barat berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2022. Sementara 3 provinsi lainnya yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dimekarkan dari Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang No. 14, 15, dan 16 Tahun 2022. Dengan demikian, jumlah keseluruhan provinsi yang berada dalam Kawasan Indonesia Timur bertambah menjadi 17 provinsi.

Pertimbangan hanya 9 provinsi yang diambil dalam penelitian ini berangkat dari tingkat kemiskinan masing-masing provinsi. Tidak semua provinsi di Kawasan Indonesia Timur memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi sehingga tidak perlu dimasukkan ke dalam penelitian. Beberapa pertimbangan mengapa penelitian ini hanya mengambil 9 provinsi adalah sebagai berikut.

- 1) Penelitian ini hanya berfokus pada provinsi-provinsi di Indonesia Timur dengan tingkat kemiskinan tinggi atau berada di atas tingkat kemiskinan nasional.
- 2) Provinsi-provinsi di Indonesia Timur yang memiliki tingkat kemiskinan berada di bawah tingkat kemiskinan nasional dianggap sudah tidak memiliki permasalahan kemiskinan yang mendesak untuk secepatnya dientaskan dan relatif sudah berada dalam jalur pembangunan yang lebih baik.
- 3) Dari jumlah 9 provinsi yang diambil dari total 13 provinsi, dianggap sudah mencakup lebih dari 50 persen wilayah atau pun sudah mencakup mayoritas permasalahan kemiskinan di Indonesia Timur sehingga representasi data tetap terjaga atau dengan kata lain hasil penelitian dapat menjelaskan permasalahan kemiskinan di kawasan tersebut.
- 4) Berdasarkan sudut pandang kebijakan, upaya pengentasan kemiskinan di provinsi-provinsi dengan tingkat kemiskinan di atas tingkat kemiskinan nasional lebih prioritas sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para perumus kebijakan, khususnya di wilayah-wilayah dengan kondisi kemiskinan yang parah.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait, seperti Badan Pusat Statistik serta lembaga relevan lainnya. Selain itu, data yang digunakan bersifat kuantitatif dan disajikan dalam bentuk angka.

Tabel 2. Deskripsi Data

Nama Variabel	Skala	Simbol	Sumber	Keterangan
Tingkat Kemiskinan	Persen	POV	BPS	Persentase penduduk miskin di suatu provinsi

Anggaran Belanja Bantuan Sosial	Rupiah	SCAS	BPS	Jumlah APBD Pemerintah Daerah di bidang bantuan sosial
Jumlah Penerima Bantuan Sosial	Jiwa	NSAR	BPS	Banyaknya orang yang menerima bantuan sosial
Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Persen	SCPR	BPS	Perbandingan antara jumlah murid yang bersekolah dengan jumlah penduduk yang sesuai dengan kelompok usia sekolah
Angka Harapan Hidup (AHH)	Usia	LFEP	BPS	Rata-rata perkiraan jumlah tahun yang dapat dijalani seseorang sejak lahir, berdasarkan kondisi mortalitas yang berlaku pada suatu tahun tertentu
Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja Formal	Persen	FLPR	BPS	Persentase tenaga kerja yang berstatus sebagai buruh, karyawan, atau pegawai dari keseluruhan tenaga kerja di suatu provinsi
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Unit	NMSB	BPS	Usaha yang memiliki kekayaan bersih kurang dari 500 juta rupiah dan memperkerjakan banyak masyarakat kelas menengah ke bawah
Tingkat Ketimpangan	Rasio	GINI	BPS, diolah	Tingkat ketimpangan pembagian pendapatan relatif antarpenduduk di suatu provinsi
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	LFPR	BPS	Persentase penduduk usia kerja yang tergolong angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja

3.3 Metode Pengumpulan Data

Proses yang dilakukan oleh peneliti untuk menemukan dan mengumpulkan informasi yang relevan dengan subjek penelitian dikenal sebagai metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data terdiri dari pencarian dan pengumpulan data resmi dari variabel terkait dari Badan Pusat Statistik untuk 9 provinsi.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi di mana suatu bagian masyarakat berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan sendiri adalah ukuran kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, kemiskinan dalam penelitian ini merupakan kemiskinan absolut atau kemiskinan yang benar-benar dialami oleh penduduk miskin akibat kurangnya kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

BPS menggunakan garis kemiskinan dalam mengelompokkan suatu masyarakat masuk dalam kategori miskin. Pada tahun 2022, atau periode terakhir penelitian ini, garis kemiskinan di Indonesia sebesar Rp.535.547 per kapita per bulan atau Rp.17.852 per kapita per hari. Angka ini dibagi menjadi Garis Kemiskinan Makanan (2.100 kkal per orang per hari) sebesar Rp.397.125 per kapita per bulan atau Rp.13.237,5 per kapita per hari dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, transportasi, dll.) sebesar Rp.138.422 per kapita per bulan atau Rp.4.614 per kapita per hari. Jika terdapat individu atau masyarakat memiliki pengeluaran di bawah angka tersebut dalam sebulan maka dikategorikan miskin.

Berbeda dengan standar kemiskinan yang diterapkan oleh BPS, Bank Dunia memiliki 3 standar garis kemiskinan berdasarkan *International Poverty Line*, pengeluaran sebesar US\$2,15 per kapita per hari untuk negara berpendapatan rendah, pengeluaran sebesar US\$3,65 per kapita per hari untuk negara berpendapatan menengah ke bawah (kategori Indonesia sampai dengan tahun 2018 dan 2020-2022), pengeluaran sebesar US\$6,85 per kapita per hari untuk negara berpendapatan menengah ke atas (kategori Indonesia sejak 2019 dan 2023-saat ini). Lebih lanjut, ketiganya dinyatakan dalam US\$ PPP (Purchasing Power Parity) atau

metode yang digunakan untuk membandingkan daya beli setiap negara. Jika menggunakan standar Bank Dunia, maka tingkat kemiskinan Indonesia akan melonjak tajam. Ini dikarenakan Bank Dunia mengelompokkan Indonesia ke dalam negara berpendapatan menengah ke atas berdasarkan *Gross National Income* (GNI) sehingga garis kemiskinan yang digunakan adalah US\$ 6,85 per kapita per hari.

Kedua standar kemiskinan tersebut, baik menurut BPS maupun Bank Dunia memiliki metodenya tersendiri seperti yang telah dijelaskan. Namun, data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data tingkat kemiskinan yang diperoleh dari BPS. Penggunaan data tingkat kemiskinan versi BPS digunakan dalam penelitian ini dikarenakan BPS mengukur kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan kebutuhan dasar yang dianggap lebih mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Indonesia. Sedangkan jika menggunakan data Bank Dunia, maka posisi Indonesia tidak menguntungkan. Ini dikarenakan Indonesia baru saja berada dalam jajaran negara-negara berpendapatan menengah ke atas, di mana memiliki rentang GNI yang cukup lebar antara US\$4.516-US\$14.005. Sementara itu, GNI Indonesia baru berada di US\$4.870 pada tahun 2023 atau berada tipis di atas batas bawah standar GNI negara-negara berpendapatan menengah ke atas. Hal ini yang mengakibatkan tingkat kemiskinan Indonesia melonjak tajam jika menggunakan standar Bank Dunia.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mendefinisikan strategi pengentasan kemiskinan sebagai kerangka kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui pendekatan yang terintegrasi dan berbasis bukti. Strategi ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan kerentanan mereka terhadap risiko sosial dan ekonomi.

3.5 Teknik Analisis

Dengan mempertimbangkan dampak dari program-program pengentasan kemiskinan yang memerlukan waktu untuk terlihat dampaknya maka penelitian ini akan menggunakan regresi data panel dinamis. Di mana regresi data panel dinamis merupakan penerapan metode kedinamisan pada suatu data saat ini yang

mempunyai hubungan dengan data sebelumnya. Terdapat keunggulan pada model data panel dinamis, yakni dapat mengukur efek jangka pendek dan efek jangka panjang (Nabilah & Setiawan, 2016). Dalam regresi panel dinamis, lag variabel dependen dalam model dianggap sebagai variabel bebas, atau dengan kata lain, nilai suatu variabel dipengaruhi oleh variabel itu sendiri di masa lampau (Robbi & Farida, 2023).

Dalam menganalisis data panel dinamis, penelitian ini menggunakan teknik analisis Generalized Method of Moment (GMM). Mengapa teknik ini dipilih dan mengapa tidak menggunakan teknik lain seperti Ordinary Least Square (OLS). Menjawab pertanyaan itu, penelitian ini telah merangkum perbedaan keduanya dari beberapa artikel terdahulu. Seperti dalam penelitian Samiani et al. (2024) yang menggunakan GMM dengan alasan jika OLS tidak bisa menangani variabel endogen dengan baik dan tidak memperhitungkan efek lag seperti yang ada dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa variabel kemiskinan tahun lalu berpengaruh ke kemiskinan tahun berjalan. Penelitian Kurita et al. (2010) mencontohkan hubungan antara kemiskinan, pertumbuhan, dan ketimpangan yang bersifat dinamis dan dapat saling memengaruhi, jika menggunakan OLS maka hasilnya menjadi bias dan inkonsisten karena tidak bisa memisahkan pengaruh simultan. Selanjutnya, penelitian Januardi & Utomo (2017) memilih teknik analisis GMM karena teknik ini tidak sesensitif OLS terhadap asumsi klasik. Selain itu, menurut penelitian Zameer et al. (2020), penggunaan GMM dapat mengurangi permasalahan multikolinieritas atau dengan kata lain GMM dapat mengurangi risiko korelasi antarvariabel independen yang sering muncul dalam data pembangunan wilayah.

Berdasarkan data pada variabel dalam penelitian ini, terdapat jumlah periode waktu sebanyak 8 tahun yaitu tahun 2015-2022 dan jumlah objek penelitian sebanyak 9 provinsi di Indonesia Timur, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat dan Papua. Dengan demikian, persamaan model regresi data panel dinamis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$POV_{it} = \beta_0 + \beta_1 POV_{i(t-1)} + \beta_2 SCAS_{it} + \beta_3 NSAR_{it} + \beta_4 SCPR_{it} + \beta_5 LFEP_{it} \\ + \beta_6 FLPR_{it} + \beta_7 NMSB_{it} + \beta_8 GINI_{it} + \beta_9 LFPR_{it} + u_{i,t}$$

Di mana:

POV_{it}	= tingkat kemiskinan
$POV_{i(t-1)}$	= lag tingkat kemiskinan
SCAS	= <i>social assistant</i> , anggaran bantuan sosial pemerintah daerah
NSAR	= <i>number of social assistant recipients</i> , jumlah penerima bantuan sosial
SCPR	= <i>school participation rate</i> , angka partisipasi sekolah
LFEP	= <i>life expectancy</i> , angka harapan hidup
FLPR	= <i>formal labor participation rate</i> , tingkat partisipasi tenaga kerja formal
NMSB	= <i>number of micro and small business</i> , jumlah UMK
GINI	= tingkat ketimpangan
LFPR	= <i>labor force participation rate</i> , tingkat partisipasi angkatan kerja
β_0	= konstanta
β_1	= koefisien lag tingkat kemiskinan
β_{2-9}	= koefisien regresi program pengentasan kemiskinan (X_{2-9})
u	= error term
i	= data 9 provinsi di Indonesia Timur
t	= data tahun 2015-2022

Model yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pendekatan macro modelling. Meskipun terdapat variabel yang mengukur aspek individual atau sektor tertentu, misalnya jumlah usaha mikro dan kecil, namun fokus utamanya adalah evaluasi dari kebijakan atau pun strategi pengentasan kemiskinan dalam skala regional (Indonesia Timur).

3.5.1 Pengujian Model Estimasi

3.5.1.1 First-Different Generalized Method of Moment (FD-GMM)

Model yang pertama adalah first-difference Generalized Method of Moment (FD-GMM) atau juga dikenal sebagai Arellano-Bond Generalized Method of Moment (AB-GMM). Instrumen tambahan dapat diperoleh dalam model data panel dinamis jika memanfaatkan kondisi ortogonalitas (tidak ada korelasi dengan *error term*) yang ada antara nilai lag y_{it} dan gangguan v_{it} (Arellano & Bond, 1991).

Persamaan FD-GMM pada kondisi awal (*initial model*) adalah sebagai berikut (Baltagi, 2005).

$$y_{it} = \delta y_{i,t-1} + u_{it} \quad i = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T$$

Di mana $u_{it} = \mu_{it} + v_{it}$ dengan $\mu_i \sim IID(0, \sigma_\mu^2)$ dan $v_{it} \sim IID(0, \sigma_v^2)$, saling bebas satu sama lain. Untuk mendapatkan estimasi δ yang konsisten untuk $N \rightarrow \infty$ dengan T tetap, persamaan berikut ditransformasi ke dalam bentuk first difference untuk menghilangkan efek individu (Baltagi, 2005).

$$y_{it} - y_{i,t-1} = \delta(y_{i,t-1} - y_{i,t-2}) + (v_{it} - v_{i,t-1})$$

Di mana $(v_{it} - v_{i,t-1})$ adalah MA(1) dengan akar unit. Penduga AB-GMM dapat terkendala oleh bias sampel terbatas (Blundell & Bond, 1998). Keberadaan bias sampel terbatas dapat dideteksi dengan mengkomparasi hasil AB-GMM dengan penduga alternatif dari parameter autoregresif. Dalam *Autoregressive(1)* atau AR(1), *pooled least square* akan memberikan suatu estimasi dengan bias ke atas (*biased upward*) dengan keberadaan pengaruh individu (*individual-specific effect*). Di sisi lain fixed effect akan memberikan dugaan dengan bias ke bawah (*biased downward*). Selanjutnya penduga konsisten dapat diekspektasi di antara penduga *pooled least square* dan *fixed effect*. Bila penduga AB-GMM dekat atau dibawah penduga fixed effect maka kemungkinan penduga AB-GMM akan *biased downward* yang dapat disebabkan oleh lemahnya instrumen (Baltagi, 2005).

3.5.1.2 Arellano-Bond System Generalized Method of Moment (SYS-GMM)

Model yang kedua adalah Blundell dan Bond System GMM (Sys-GMM). (Blundell & Bond, 1998) meninjau kembali pentingnya memanfaatkan kondisi awal dalam menghasilkan penduga yang efisien model data panel dinamis ketika T (periode waktu penelitian) berukuran kecil. Blundell dan Bond mempertimbangkan model data panel autoregresif sederhana tanpa regressor eksogen (Baltagi, 2005).

$$y_{it} = \delta y_{i,t-1} + \mu_i + v_{it}$$

Dengan $E(\mu_i) = 0$, $E(v_{it}) = 0$ dan $E(\mu_i v_{it}) = 0$ untuk $i = 1, 2, \dots, N$; $t = 1, 2, \dots, T$. (Blundell & Bond, 1998) fokus pada kasus di mana $T = 3$ dan oleh karena

itu hanya ada satu kondisi ortogonalitas yang diberikan oleh $E(y_{i1} \Delta v_{i3}) = 0$, sehingga δ dapat teridentifikasi. Dalam hal ini, regresi tahap pertama diperoleh dengan meregresikan Δy_{i2} pada y_{i1} (Baltagi, 2005).

Blundell dan Bond menghubungkan bias dan presisi yang buruk dari estimator FD-GMM dengan instrumen yang lemah dan dicirikan dengan konsentrasi parameternya. Selanjutnya, Blundell dan Bond menunjukkan bahwa pembatasan stasioneritas ringan tambahan pada proses kondisi awal memungkinkan penggunaan estimator SYS-GMM diperluas menggunakan perbedaan lag dari y_{it} sebagai instrumen untuk persamaan di tingkat level, selain tingkat lag dari y_{it} sebagai instrumen untuk persamaan dalam first differences. Penduga SYS-GMM terbukti memiliki peningkatan efisiensi dibandingkan dengan FD-GMM karena $\delta \rightarrow 1$ dan $(\sigma_\mu^2/\sigma_u^2)$ meningkat (Baltagi, 2005).

3.5.2 Menentukan Model Estimasi Terbaik

Dalam menentukan atau memilih model terbaik pada data panel dinamis, dilakukan pengujian menggunakan 3 kriteria yakni validitas instrumen, konsistensi dan tidak bias.

3.5.2.1 Uji Validitas Model (Uji Sargan)

Uji Sargan digunakan untuk mengidentifikasi validitas keseluruhan variabel instrumen yang jumlahnya melebihi jumlah parameter yang diduga (kondisi over-identifying) dengan hipotesis nol yaitu instrumen valid (over-identifying restrictions are valid, variabel instrumen tidak berkorelasi dengan error) (Baltagi, 2005). Selain untuk menguji validitas variabel instrumen, uji ini digunakan juga untuk melihat apakah data residual estimasi GMM terjadi homoskedastisitas. Dengan demikian, hipotesis Uji Sargan adalah sebagai berikut.

H_0 : Variabel instrumen valid

H_a : Variabel instrumen tidak valid

Jika nilai probabilitas *chi-square* lebih besar dari tingkat signifikansi (*alpha*) 0,05 maka H_0 diterima sehingga validitas instrumen telah tercapai dan

sudah memenuhi kriteria ‘valid’. Sedangkan jika nilai probabilitas *chi-square* lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak sehingga belum memenuhi kriteria ‘valid’.

3.5.2.2 Uji Konsistensi Model (Uji Arellano-Bond)

Uji Arellano Bond digunakan untuk memastikan *error term* tidak berkorelasi serial pada AR(2) sehingga estimasi yang diperoleh konsisten (Arellano, 2003). Hasil yang diharapkan adalah tidak menolak hipotesis nol dengan signifikansi 0,05 pada pengujian tersebut. Dengan demikian, hipotesis Uji AB adalah sebagai berikut.

H_0 : Tidak terdapat autokorelasi

H_a : Terdapat autokorelasi

Jika nilai probabilitas *z-Statistic* pada AR(2) lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 maka H_0 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi dan sudah memenuhi kriteria ‘konsisten’. Sedangkan jika nilai probabilitas *z-Statistic* pada AR(2) lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak sehingga terdapat autokorelasi.

3.5.2.3 Uji Ketidakbiasan pada Model

Uji terakhir yang dilakukan dalam memenuhi syarat model terbaik yakni dengan menguji ketidakbiasan pada model. Suatu model GMM dikatakan sudah memenuhi kriteria ‘tidak bias’ apabila estimator (penduga) model GMM yang digunakan berada di antara estimator *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Pooled Least Square* (PLS). Dengan kata lain, sebuah model dikatakan tidak bias apabila nilai koefisien dari variabel lag dependen atau lag(Y) pada model GMM berada pada rentang antara nilai koefisien dari variabel lag dependen pada model FEM dan PLS.

3.5.3 Uji Signifikansi

Dalam analisis data panel dinamis, uji signifikansi secara parsial menggunakan Uji z. Menurut Gujarati & Porter (2009), uji z digunakan untuk menguji signifikansi masing-masing variabel independen atau pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Jika probabilitas z-

Statistic lebih kecil dari atau sama dengan 0,05 maka variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dalam tingkat signifikansi 0,05. Hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini diuji melalui Uji z untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Hipotesis model yang menganalisis program pengentasan kemiskinan adalah sebagai berikut.

- 1) Strategi pengentasan kemiskinan dengan peningkatan bantuan sosial, variabel anggaran bantuan sosial (X_1)
 $H_o : \beta_1 = 0$, tidak ada pengaruh dari anggaran bantuan sosial (X_1) terhadap tingkat kemiskinan (Y)
 $H_a : \beta_1 < 0$, terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari anggaran bantuan sosial (X_1) terhadap tingkat kemiskinan (Y)
- 2) Strategi pengentasan kemiskinan dengan peningkatan bantuan sosial, variabel jumlah penerima bantuan sosial (X_2)
 $H_o : \beta_2 = 0$, tidak ada pengaruh dari jumlah penerima bantuan sosial (X_2) terhadap tingkat kemiskinan (Y)
 $H_a : \beta_2 < 0$, terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari jumlah penerima bantuan sosial (X_2) terhadap tingkat kemiskinan (Y)
- 3) Strategi pengentasan kemiskinan dengan peningkatan akses terhadap layanan dasar di bidang pendidikan, variabel angka partisipasi sekolah (X_3)
 $H_o : \beta_3 = 0$, tidak ada pengaruh dari angka partisipasi sekolah (X_3) terhadap tingkat kemiskinan (Y)
 $H_a : \beta_3 < 0$, terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari angka partisipasi sekolah (X_3) terhadap tingkat kemiskinan (Y)
- 4) Strategi pengentasan kemiskinan dengan peningkatan akses terhadap layanan dasar di bidang kesehatan, variabel angka harapan hidup (X_4)
 $H_o : \beta_4 = 0$, tidak ada pengaruh dari angka harapan hidup (X_4) terhadap tingkat kemiskinan (Y)
 $H_a : \beta_4 < 0$, terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari angka harapan hidup (X_4) terhadap tingkat kemiskinan (Y)
- 5) Strategi pengentasan kemiskinan dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat, variabel tingkat partisipasi tenaga kerja formal (X_5)

$H_0 : \beta_5 = 0$, tidak ada pengaruh dari tingkat partisipasi tenaga kerja formal (X_5) terhadap tingkat kemiskinan (Y)

$H_a : \beta_5 < 0$, terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari tingkat partisipasi tenaga kerja formal (X_5) terhadap tingkat kemiskinan (Y)

- 6) Strategi pengentasan kemiskinan dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat, variabel jumlah usaha mikro dan kecil (X_6)

$H_0 : \beta_6 = 0$, tidak ada pengaruh dari jumlah usaha mikro dan kecil (X_6) terhadap tingkat kemiskinan (Y)

$H_a : \beta_6 < 0$, terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari jumlah usaha mikro dan kecil (X_6) terhadap tingkat kemiskinan (Y)

- 7) Strategi pengentasan kemiskinan dengan peningkatan pembangunan inklusif, variabel ketimpangan pendapatan (X_7)

$H_0 : \beta_7 = 0$, tidak ada pengaruh dari ketimpangan pendapatan (X_7) terhadap tingkat kemiskinan (Y)

$H_a : \beta_7 > 0$, terdapat pengaruh positif dan signifikan dari ketimpangan pendapatan (X_7) terhadap tingkat kemiskinan (Y)

- 8) Strategi pengentasan kemiskinan dengan peningkatan pembangunan inklusif, variabel tingkat partisipasi angkatan kerja (X_8)

$H_0 : \beta_8 = 0$, tidak ada pengaruh dari tingkat partisipasi angkatan kerja (X_8) terhadap tingkat kemiskinan (Y)

$H_a : \beta_8 < 0$, terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari tingkat partisipasi angkatan kerja (X_8) terhadap tingkat kemiskinan (Y)

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil olah data, analisis dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, berikut adalah ringkasan keseluruhan hasil tesis ini.

1. Strategi pengentasan kemiskinan melalui program bantuan sosial yang diproksikan dengan jumlah nominal bantuan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia Timur dengan taraf signifikansi 5 persen dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang tidak signifikan.
2. Strategi pengentasan kemiskinan melalui program bantuan sosial yang diproksikan dengan jumlah penerima bantuan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia Timur dengan taraf signifikansi 5 persen dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang tidak signifikan.
3. Strategi pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar di bidang pendidikan yang diproksikan dengan angka partisipasi sekolah tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia Timur.
4. Strategi pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar di bidang kesehatan yang diproksikan dengan angka harapan hidup tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia Timur.
5. Strategi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat yang diproksikan dengan tingkat partisipasi tenaga kerja formal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia Timur dengan taraf signifikansi 5 persen dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang tidak signifikan.
6. Strategi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat yang diproksikan dengan jumlah usaha mikro dan kecil tidak signifikan terhadap

tingkat kemiskinan di Indonesia Timur dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang berpengaruh negatif dan signifikan dengan taraf signifikansi 5 persen.

7. Strategi pengentasan kemiskinan melalui pembangunan inklusif yang diproksikan dengan rasio ketimpangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia Timur dengan taraf signifikansi 10 persen dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang tidak signifikan.
8. Strategi pengentasan kemiskinan melalui pembangunan inklusif yang diproksikan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia Timur.

5.2 Saran

Setelah disimpulkan menjadi beberapa poin dan dengan mempertimbangkan keseluruhan hasil dari penelitian ini, berikut adalah beberapa saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Secara jangka pendek, terdapat pengaruh yang signifikan dari jumlah nominal bantuan sosial, jumlah penerima bantuan sosial, partisipasi tenaga kerja formal dan tingkat ketimpangan. (1) Terkait dengan jumlah nominal bantuan sosial, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan nominal bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat rentan di Indonesia Timur dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sembari pemerintah memberikan pelatihan dan kesempatan bekerja agar masyarakat rentan tersebut dapat keluar dari kemiskinan dan tidak bergantung pada bantuan sosial secara jangka panjang. (2) Pemerintah juga harus meningkatkan jangkauan dan aksesibilitas program bantuan sosial untuk memastikan bahwa lebih banyak orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan. Namun, setelah masyarakat rentan tersebut keluar dari kemiskinan karena telah menerima pelatihan atau kesempatan bekerja, maka pemerintah tidak perlu memasukkan mereka ke dalam penerima bantuan agar mereka memiliki kemandirian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. (3) Selanjutnya, terkait dengan partisipasi tenaga kerja formal, penting bagi pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan yang mendorong kualitas tenaga kerja dan kuantitas lowongan pekerjaan. Termasuk mendorong perusahaan untuk

memberikan upah dan tunjangan yang adil serta mendukung hak-hak pekerja melalui peraturan ketenagakerjaan. Ditambah program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. (4) Terakhir, terkait dengan tingkat ketimpangan, penting bagi pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan di masyarakat. Selain itu, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif seperti mendukung pembangunan yang melibatkan masyarakat lokal dapat membantu mendistribusikan sumber daya secara lebih merata di berbagai segmen masyarakat.

Secara jangka panjang, terdapat pengaruh yang signifikan dari jumlah usaha mikro dan kecil. Untuk meningkatkan potensi jangka panjang usaha mikro dan kecil (UMK) dalam pengentasan kemiskinan, pemerintah harus fokus pada penciptaan lingkungan yang memungkinkan kegiatan ini berkembang. Semisal kemudahan perizinan pendirian usaha dan program pelatihan yang meningkatkan keterampilan kewirausahaan masyarakat. Selain itu, membina kemitraan antara UMK dan perusahaan yang lebih besar dapat memfasilitasi akses pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Terakhir, terdapat pengaruh yang tidak signifikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dari angka partisipasi sekolah, angka harapan hidup dan tingkat partisipasi angkatan kerja. (1) Terkait dengan angka partisipasi sekolah, pemerintah perlu mengalihkan fokusnya dari sekadar meningkatkan angka partisipasi sekolah menjadi meningkatkan kualitas pendidikan. Selama pemerintah hanya dapat membangun infrastruktur dan meningkatkan angka partisipasi sekolah semata namun mengabaikan kualitas hasil pendidikan, seperti minimnya kualitas lulusan di suatu institusi pendidikan di Indonesia Timur, maka hal ini akan menjadi sia-sia. (2) Terkait dengan angka harapan hidup, pemerintah harus memprioritaskan tidak hanya meningkatkan akses kesehatan tetapi juga meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang tersedia bagi masyarakat miskin. Kemudian, mempromosikan langkah preventif dan pengetahuan dasar tentang kesehatan kepada masyarakat miskin agar mereka bertanggung jawab atas kesehatan mereka sendiri dan pada akhirnya mengarah pada hasil kesehatan yang lebih baik sehingga dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. (3) Terakhir, terkait dengan tingkat partisipasi angkatan kerja, penting bagi pemerintah untuk menciptakan

peluang kerja di berbagai sektor sambil memastikan bahwa pekerja memiliki akses ke pelatihan dan pendidikan yang diperlukan agar dapat bersaing secara efektif di pasar kerja. Selain itu, mengatasi hambatan seperti diskriminasi (misalnya batas usia, tinggi badan, penampilan, warna kulit dll.) atau kesenjangan geografis (misalnya khusus Jabodetabek, Pulau Jawa, luar Pulau Jawa, Indonesia Timur dll.) dalam ketersediaan lapangan kerja sangat penting untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeosun, O. A., & Tabash, M. I. (2022). Pro-poor and inclusive growth in West Africa. *African Journal of Economic and Management Studies*, 13(1), 105–135. <https://doi.org/10.1108/AJEMS-08-2021-0359>
- Agustanta, N., Dewi Anggalini, T., Septiningrum, L., & Dewanti, P. (2024). Assessing the Effectiveness of Social Assistance Programs to Alleviating Poverty in Indonesia. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i7.15526>
- Alexander, K. (2015). Inclusive Growth Topic Guide. In *GSDRC Topic Guide*. University of Birmingham. www.gsdr.org
- Alwago, W. O. (2023). The nexus between health expenditure, life expectancy, and economic growth: ARDL model analysis for Kenya. *Regional Science Policy & Practice*, 15(5), 1064–1086. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12588>
- Anita, R. D., & Udjianto, D. W. (2024). Determinants of Inclusive Economic Development: A Fixed Effect Model Approach. *JAMPE (Journal of Asset Management and Public Economy)*, 3(1), 60–75. <https://doi.org/10.12928/jampe.v3i1.9101>
- Annur, R. A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jekulo dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4), 409–426. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Arellano, M. (2003). *Panel Data Econometrics - Advanced Texts in Econometrics*. Oxford University Press.
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. *Source: The Review of Economic Studies*, 58(2), 277–297.
- Arham, M. A. (2020). Does Agricultural Performance Contribute to Rural Poverty Reduction in Indonesia? *JEJAK*, 13(1), 69–83. <https://doi.org/10.15294/jejak.v13i1.20178>
- Arsyad, L. (2015). *Ekonomi Pembangunan* (Edisi Kelima). UPP STIM YKPN.
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data* (3rd ed.). John Wiley & Sons.

- Balvociute, R. (2020). Social Assistance for Poverty Reduction in the EU Countries: An Aspect of Socio-Economic Sustainability. *European Journal of Sustainable Development*, 9(1), 469. <https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n1p469>
- Bappenas. (n.d.). *Agenda 2030 Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Retrieved February 5, 2024, from <https://sdgs.bappenas.go.id/>
- Barbier, E. B., & Burgess, J. C. (2019). Sustainable development goal indicators: Analyzing trade-offs and complementarities. *World Development*, 122, 295–305. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.05.026>
- Barrientos, A. (2019). *The Role of Social Assistance in Reducing Poverty and Inequality in Asia and the Pacific*. <https://doi.org/10.22617/WPS190423-2>
- Beall, J., Guha-Khasnobis, B., Kanbur, R., & Ogun, T. P. (2010). Infrastructure and Poverty Reduction Implications for Urban Development in Nigeria. *Urban Forum*. www.wider.unu.edu
- Ben Amar, M., & Zghidi, N. (2016). *The Relationship Between Inclusive Growth, Inequality and Poverty in Africa*. 23(1), 117–126.
- Beverly, J., Stewart, S. L., & Neill, C. L. (2023). The dynamics of labor force participation: Is all quiet on the Appalachian front? *Empirical Economics*, 65(6), 2867–2898. <https://doi.org/10.1007/s00181-023-02447-1>
- Beverly, J., Stewart, S. L., & Neill, C. L. (2024). What drives labor force participation rate variability? The case of West Virginia. *Economic Modelling*, 140, 106861. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2024.106861>
- Bilenkisi, F. (2024). Uncertainty, labour force participation and job search. *Economic Modelling*, 139, 106833. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2024.106833>
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. *Journal of Econometrics*, 87, 115–143.
- Chambers, R. (1995). Poverty and livelihoods: whose reality counts? *Environment and Urbanization*, 7(1), 173–204.
- Díaz-Sánchez, J. P., & Correa, H. (2024). Immigration and formal labor market participation in Ecuador: Empirical insights from a developing nation. *Research in Globalization*, 8, 100198. <https://doi.org/10.1016/j.resglo.2024.100198>
- Doerr, A., & Novella, R. (2024). The long-term effects of job training on labor market and skills outcomes in Chile. *Labour Economics*, 91, 102619. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2024.102619>

- Faishal, M., Mathew, S., Neikha, K., Pusa, K., & Zhimomi, T. (2023). The future of work: AI, automation, and the changing dynamics of developed economies. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 18(3), 620–629. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2023.18.3.1086>
- Faturohim, A., Akbar, A., Hidayat, B. A., & Saksono, H. (2023). An Analysis of Urban Poverty and Unemployment. *Jurnal Bina Praja*, 15(2), 309–324. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.309-324>
- Febriandika, N. R., Rahayu, C., & Kumar, R. (2022). The Determinant Factors of Poverty in Eastern Indonesia: Evidence from 12 Provinces. *JEJAK*, 15(2), 283–299. <https://doi.org/10.15294/jejak.v15i2.36675>
- Fiszbein, A., Kanbur, R., & Yemtsov, R. (2014). Social Protection and Poverty Reduction: Global Patterns and Some Targets. *World Development*, 61, 167–177. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.04.010>
- Fofana, I., Mabugu, R. E., Camara, A., & Abidoye, B. (2024). Ending poverty and accelerating growth in South Africa, through the expansion of its social grant system. *Journal of Policy Modeling*, 46(6), 1090–1102. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2024.07.003>
- Fonseca, L. M., Domingues, J. P., & Dima, A. M. (2020). Mapping the sustainable development goals relationships. *Sustainability (Switzerland)*, 12(8). <https://doi.org/10.3390/SU12083359>
- Gibson, J., & Olivia, S. (2010). The Effect of Infrastructure Access and Quality on Non-Farm Enterprises in Rural Indonesia. *World Development*.
- Gounder, R., & Xing, Z. (2012). Impact of education and health on poverty reduction: Monetary and non-monetary evidence from Fiji. *Economic Modelling*, 29(3), 787–794. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.01.018>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (Fifth Edition). The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Heisig, J. P., Gesthuizen, M., & Solga, H. (2019). Lack of skills or formal qualifications? New evidence on cross-country differences in the labor market disadvantage of less-educated adults. *Social Science Research*, 83, 102314. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2019.06.005>
- Hodijah, S., & Mustika, C. (2020). Effect of Labor and Number of Micro and Small Enterprises (MSEs) On Poverty Rate in Indonesia. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 8(3), 195–208. <https://doi.org/10.22437/ppd.v8i3.9076>
- Idris, K., Syaparuddin, & Hodijah, S. (2014). Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jambi. In *Jurnal Paradigma Ekonomika* (Vol. 9, Issue 1).

- Idrus, S., & Rosida, L. (2020). Poverty In Indonesia: Critical Review. *Archives of Business Research*, 8(6), 127–132. <https://doi.org/10.14738/abr.86.8326>
- Iqbal, M., Rifin, A., & Juanda, B. (2019). Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Wilayah di Provinsi Aceh. *TATALOKA*, 21(1), 75–84. <https://doi.org/10.14710/tataloka.21.1.75-84>
- Jahan, S., & Mccleery, R. (2005). *Making Infrastructure Work for the Poor: Synthesis Report of Four Country Studies Bangladesh, Senegal, Thailand and Zambia*. <https://waterfund.go.ke/watersource/Downloads/007.%20Making%20Infrastru%20working%20for%20the%20Poor.pdf>
- Januardi, R. W., & Utomo, A. P. (2017). Application of spatial error model using GMM estimation in impact of education on poverty alleviation in Java, Indonesia. *Communications in Science and Technology*, 2(2), 53–63. <https://doi.org/10.21924/cst.2.2.2017.50>
- Kaur, J. (2018). Impact Assessment of Access to Basic Services for Urban Poor in Chandigarh City, India. *Asian Journal of Public Affairs*, 11(1). <https://doi.org/10.18003/ajpa.20188>
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Palgrave Macmillan.
- Kim, S.-K. (2019). 사회보장제도의 안심소득제가 수혜자의 경제적 자립과 생활만족에 미치는 영향 The Effects of Safety Income System on Recipient's Economic Independence and Life Satisfaction under the Social Security System. *The Journal of the Korea Contents Association*. <https://doi.org/10.5392/JKCA.2019.19.04.598>
- Kis-Katos, K., & Sparrow, R. (2015). Poverty, labor markets and trade liberalization in Indonesia. *Journal of Development Economics*, 117, 94–106. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2015.07.005>
- Kroll, C., Warchold, A., & Pradhan, P. (2019). Sustainable Development Goals (SDGs): Are we successful in turning trade-offs into synergies? *Palgrave Communications*, 5(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-019-0335-5>
- Kumala, S. N. (2023). Reviewing Accessibility in Eastern Indonesia and its Effect on Poverty. *Medan International Conference Economics and Business*, 1–10.
- Kuncoro, M. (2010). *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan* (Edisi ke-5). UPP STIM YKPN.
- Kuntjorowati, E., Andari, S., Prayoga, R. A., Yusuf, H., Soegiharto, S., Fatimah, S., Listyawati, A., Yuniarti, L., Suryani, & Hakim, F. N. (2024). Effectiveness of strengthening social protection and security programs in alleviating poverty

- in rural areas through multi-sector partnerships. *Heliyon*, 10(23), e40485. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e40485>
- Kurita, K., Kurosaki, T., Kalirajan, K., Frazer, G., Garcia-Penalosa, C., Klasen, S., Hayami, Y., Otsuka, K., & Sawada, Y. (2010). *The Dynamics of Growth, Poverty, and Inequality: A Panel Analysis of Regional Data from Thailand and the Philippines*.
- Langoday, T. O., & Man, S. (2024). The Role of Population Growth, Education Level, Labor Force Participation Rate On Poverty Level in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(2), e3011. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i2.3011>
- Linden, M., & Ray, D. (2017). Life expectancy effects of public and private health expenditures in OECD countries 1970–2012: Panel time series approach. *Economic Analysis and Policy*, 56, 101–113. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2017.06.005>
- Liu, Q. Q., Yu, M., & Wang, X. L. (2015). Poverty reduction within the framework of SDGs and Post-2015 Development Agenda. *Advances in Climate Change Research*, 6(1), 67–73. <https://doi.org/10.1016/j.accre.2015.09.004>
- Mainali, B., Luukkanen, J., Silveira, S., & Kaivo-Oja, J. (2018). Evaluating synergies and trade-offs among Sustainable Development Goals (SDGs): Explorative analyses of development paths in South Asia and Sub-Saharan Africa. *Sustainability (Switzerland)*, 10(3). <https://doi.org/10.3390/su10030815>
- Maksimov, V., Wang, S. L., & Luo, Y. (2017). Reducing poverty in the least developed countries: The role of small and medium enterprises. *Journal of World Business*, 52(2), 244–257. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2016.12.007>
- Mardiana, Militina, T., & Utary, A. R. (2017). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan dan Kesehatan serta Infrastruktur Terhadap Tingkat Pengangguran serta Tingkat Kemiskinan. *Inovasi*, 13(1), 50–60.
- Medeiros, V., Ribeiro, R. S. M., & Amaral, P. V. M. do. (2021). Infrastructure and household poverty in Brazil: A regional approach using multilevel models. *World Development*, 137. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105118>
- Meilvidiri, W., Jafar, R., Asrudi, Syahrudin, Nahumury, M. A. I., & Akbar, M. (2020). The development of infrastructure and the level of poverty in the eastern part of Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 473(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/473/1/012134>
- Meyer, B., & Wu, D. (2018). *The Poverty Reduction of Social Security and Means-Tested Transfers*. <https://doi.org/10.3386/w24567>

- Mihai, M., Țițan, E., & Manea, D. (2015). Education and Poverty. *Procedia Economics and Finance*, 32, 855–860. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01532-4](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01532-4)
- Miles, D. (2023). Macroeconomic impacts of changes in life expectancy and fertility. *The Journal of the Economics of Ageing*, 24, 100425. <https://doi.org/10.1016/j.jeoa.2022.100425>
- Miranti, R., & Resosudarmo, B. P. (2005). Understanding Regional Poverty in Indonesia: Is Poverty Worse in the East than in the West. *The Australasian Journal of Regional Studies*, 141–154.
- Nabilah, D., & Setiawan. (2016). Pemodelan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menggunakan Data Panel Dinamis dengan Pendekatan Generalized Method of Moment Arellano-Bond. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 5(2), 2337–3520.
- Nuarisa, R. H., Aziz, M. A., & Retnowati, M. S. (2024). The Empowerment of Micro, Small Medium Enterprises (MSMEs) Bussiness Through Productive Zakat as an Effort to Alleviate Poverty and Unemployment in Indonesia. *Journal of Economics, Bussiness and Management Issues*, 2(2), 149–158. <https://doi.org/10.47134/jebmi.v2i2.188>
- Nugraheni, D., & Priyarsono, D. S. (2012). Kinerja Keuangan Daerah, Infrastruktur dan Kemiskinan: Analisis Kabupaten/Kota di Indonesia 2006-2009. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 12(2), 148–167. <https://doi.org/10.21002/jepi.v12i2.05>
- Nugroho, A., Amir, H., Maududy, I., & Marlina, I. (2021). Poverty eradication programs in Indonesia: Progress, challenges and reforms. *Journal of Policy Modeling*, 43(6), 1204–1224. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2021.05.002>
- Nursini, N. (2020). Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and poverty reduction: empirical evidence from Indonesia. *Development Studies Research*, 7(1), 153–166. <https://doi.org/10.1080/21665095.2020.1823238>
- Pritadrajati, D. (2023). Does social assistance disincentivise employment, job formality, and mobility? *Labour Economics*, 84, 102398. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2023.102398>
- Pshenychna, M., & Prisniak, S. (2024). Inclusive Development as A Means of Reducing Economic Inequality and Poverty at The Macro Level. *Visnyk Universytetu "Ukraina,"* 11 (38), 136–147. <https://doi.org/10.36994/2707-4110-2024-11-38-12>
- Purwanti, D. (2024). Inclusive economic growth and fiscal intervention: could it reduce poverty, inequality, and unemployment in East Java? *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 25(1), 148–166. <https://doi.org/10.18196/jesp.v25i1.21694>

- Putri, R. F., Sarajwati, M. K. A., Aini, F. A. N., Setiacahyandari, H. K., Dairina, I., & Dewi, A. K. (2023). Formal-Informal Employment and Poverty Dynamics: A Case Study of Mentawai Islands Regency, 2019-2021. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1233(1), 012034. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1233/1/012034>
- Radosavljević, M., & Drekočić, E. (2021). Identification of Limitations in the Implementation of Process Approach in SMEs in the Republic of Serbia. *Proceedings of the 26th International Scientific Conference Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management*. https://doi.org/10.46541/978-86-7233-397-8_153
- Rajaona, A., Limbe, M., & Ali, M. A. (2024). Exploring the Relationship between Formal Employment and Household Welfare: Evidence from Rural Tanzania. *MPRA: Munich Personal RePEc Archive*.
- Ravallion, M. (2001). Growth, Inequality and Poverty: Looking Beyond Averages. *World Development*, 29(11), 1803–1815. <http://econ.worldbank.org>.
- Robbi, I., & Farida, L. U. (2023). Kontraksi Ekspor Impor Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia (Studi Kasus Data Panel 34 Provinsi). *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 17(1), 69–84.
- Saadaoui Mallek, R., Awad, A., Ozturk, I., & ben Douissa, I. (2024). Infrastructure development and poverty eradication in sub-Saharan Africa; Its effect and transmission channels. *Cities*, 144. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104658>
- Samiani, S., Endang, E., Susilo, J. H., & Astuti, H. (2024). Dynamic panel data modeling of Indonesia's poverty level 2013-2022. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 25(1), 130–147. <https://doi.org/10.18196/jesp.v25i1.21079>
- Sandee, H. (2016). Improving Connectivity in Indonesia: The Challenges of Better Infrastructure, Better Regulations, and Better Coordination. *Asian Economic Policy Review*, 11(2), 222–238. <https://doi.org/10.1111/aepr.12138>
- Setiawan, A. B., Prasetyo, F. H., Yusuf, M., Prajanti, S. D. W., & Bowo, P. A. (2024). Pembangunan Inklusif dan Industrialisasi di Indonesia: Dampaknya terhadap Kesejahteraan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 24(2). <https://doi.org/10.21002/jepi.2024.10>
- Sharp, A. M., Register, C. A., & Grimes, P. W. (2009). *Economics of Social Issues* (19th ed.). McGraw-Hill/Irwin.
- Singh, G., & Lee, H. (2020). Marked Disparities in Life Expectancy by Education, Poverty Level, Occupation, and Housing Tenure in the United States, 1997-2014. *International Journal of Maternal and Child Health and AIDS (IJMA)*, 10(1), 7–18. <https://doi.org/10.21106/ijma.402>

- Smythe, A., Martins, I., & Andersson, M. (2024). Inequality, poverty, and resilience to economic shrinking. *International Journal of Development Issues*, 23(1), 40–81. <https://doi.org/10.1108/IJDI-06-2023-0168>
- Soegoto, H., Suryatno Wiganepdo Soegoto, & Meyer, D. F. (2022). The role of domestic investment, foreign investment and the number of Micro Small and Medium-Sized Enterprises to reduce poverty in Indonesia. *Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR)*, 9(5), 901–913. <https://doi.org/10.15549/jeecar.v9i5.1072>
- Spada, A., Fiore, M., & Galati, A. (2024). The Impact of Education and Culture on Poverty Reduction: Evidence from Panel Data of European Countries. *Social Indicators Research*, 175(3), 927–940. <https://doi.org/10.1007/s11205-023-03155-0>
- Sudaryati, S., Ahmad, A. A., & Suprpto, S. (2021). The Effect of Average Length of Schooling, Life Expectancy and Economic Growth on Poverty in Banjarnegara Regency 2005-2019. *Eko-Regional: Jurnal Pengembangan Ekonomi Wilayah*, 16(1). <https://doi.org/10.20884/1.erjpe.2021.16.1.1677>
- Sugiasuti, N., & Ulinuha, R. (2023). Politik Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat: Kasus Ketergantungan Kebijakan Bantuan Sosial di Temanggung, Jawa Tengah. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.20961/sp.v19i1.78588>
- Suryawati, C. (2015). Memahami Kemiskinan secara Multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8(3), 121–129.
- Tambunan, T. T. H. (2023). The Importance of MSMEs for Poverty Alleviation: A Story from Indonesia. *International Journal of Current Science Research and Review*, 06(10). <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V6-i10-36>
- Tamsah, H., & Nurung, J. (2024). Social and Economic Interventions to Alleviate Poverty in Makassar City. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 11(1), 623–639. <https://doi.org/10.33096/jmb.v11i1.845>
- Tekgüç, H. (2018). Declining Poverty and Inequality in Turkey: The Effect of Social Assistance and Home Ownership. *South European Society and Politics*, 23(4), 547–570. <https://doi.org/10.1080/13608746.2018.1548120>
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (n.d.). *Overview of the Acceleration Strategy*. Retrieved March 10, 2024, from <https://www.tnp2k.go.id/acceleration-policies/overview-of-the-acceleration-strategy>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (A. Maulana & N. I. Sallama, Eds.; Edisi Kesebelas). Penerbit Erlangga.

- Tohari, A., Parsons, C., & Rammohan, A. (2019). Targeting poverty under complementarities: Evidence from Indonesia's unified targeting system. *Journal of Development Economics*, 140, 127–144. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2019.06.002>
- Torres, R. M. S. (2020). Poverty and labor informality in Colombia. *IZA Journal of Labor Policy*, 10(1). <https://doi.org/10.2478/izajolp-2020-0006>
- United Nations. (2023a). *What is Goal 1 - No Poverty*. https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2023/09/Goal-1_Fast-Facts.pdf
- United Nations. (2023b). *What is Goal 3 - Good Health and Well-Being*. https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2023/09/Goal-3_Fast-Facts.pdf
- United Nations. (2023c). *What is Goal 4 - Quality Education*. https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2023/09/Goal-4_Fast-Facts.pdf
- United Nations. (2023d). *What is Goal 8 - Decent Work and Economic Growth*. https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2023/09/Goal-8_Fast-Facts.pdf
- Veronica, S., Manlio, D. G., Shlomo, T., Antonio, M. P., & Victor, C. (2020). International social SMEs in emerging countries: Do governments support their international growth? *Journal of World Business*, 55(5), 100995. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2019.05.002>
- Vishnevskiy, K., Meissner, D., & Egorova, O. (2015). Foresight for SMEs: How to Overcome the Limitations in Small Firms? *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2643405>
- Walker, C. C., Druckman, A., & Jackson, T. (2021). Welfare systems without economic growth: A review of the challenges and next steps for the field. *Ecological Economics*, 186, 107066. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107066>
- Wang, L., Zhang, F., Wang, Z., & Tan, Q. (2022). The impact of rural infrastructural investment on farmers' income growth in China. *China Agricultural Economic Review*, 14(1), 202–219. <https://doi.org/10.1108/CAER-09-2020-0211>
- Wang, Q., Tian, Z., & Zhu, S. (2024). Paired assistance and poverty alleviation: Experience and evidence from China. *PLOS ONE*, 19(2), e0297173. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0297173>

- Warsilan, & Noor, A. (2015). Peranan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasi pada Kebijakan Pembangunan di Kota Samarinda. *MIMBAR*, 31(2), 359–366.
- Wiratama, B. F., Kurniawan, R., Mulyanto, Isnaeni, M. A., Sumargo, B., & Gio, P. U. (2023). Measuring the physical infrastructure development as poverty reduction program in Kalimantan, Indonesia. *Cities*, 141, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104515>
- Woodbridge, M. (2015). *From MDGs to SDGs: What are the Sustainable Development Goals*. ICLEI—Local Governments for Sustainability.
- World Bank. (2000). *World Development Report 2000/2001*. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/0-1952-1129-4>
- Yan, Z., Lu, F., Ting, T., & Xu, D. (2021). Measurement and Evaluation of Regional Differences in Educational Poverty Alleviation Performance in Western China Based on Improved Entropy-Integrated Index Model. *2021 2nd International Conference on Education, Knowledge and Information Management (ICEKIM)*, 309–312. <https://doi.org/10.1109/ICEKIM52309.2021.00075>
- Yang, Y., Zhou, L., Zhang, C., Luo, X., Luo, Y., & Wang, W. (2022). Public Health Services, Health Human Capital, and Relative Poverty of Rural Families. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(17), 11089. <https://doi.org/10.3390/ijerph191711089>
- Zameer, H., Shahbaz, M., & Vo, X. V. (2020). Reinforcing poverty alleviation efficiency through technological innovation, globalization, and financial development. *Technological Forecasting and Social Change*, 161, 120326. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120326>
- Zhang, H. (2017). Opportunity or new poverty trap: Rural-urban education disparity and internal migration in China. *China Economic Review*, 44, 112–124. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2017.03.011>
- Zhou, Z., Bu, Y., & Gao, X. (2021). Analysis of Regional Wage Difference in Labor Market Discrimination. *Modern Management Forum*, 5(1), 11. <https://doi.org/10.18686/mmfv5i1.3164>
- Zurita, A. C. P., & Torres, M. V. M. (2022). La discriminación laboral por género en Ecuador. *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*, 5(1), 187–191. <https://doi.org/10.62452/vak4a177>